



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2019



## **PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

**Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Telp./faxc. 0274-367348**

**Surel: surat@pn-bantul.go.id ; pn\_bantul@yahoo.co.id**

**Website: www.pn-bantul.go.id**

**KETUA DAN WAKIL KETUA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



**ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.**  
Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B



**KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAP, S.H., M.H.**  
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B

HAKIM  
PENGADILAN NEGERI BANTUL



DEWI KURNIASARI, S.H.



SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.



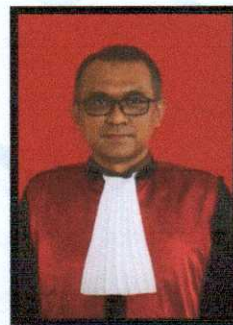
LAILY FITRIA TITIN ANUGERAHWATI, S.H.,  
M.H.



KOKO RIYANTO, S.H.



CAHYA IMAWATI, S.H., M.Hum.



RADEN RAJENDRA MOHNI  
ISWOYOKUSUMO, S.H., M.H.



EVI INSIYATI, S.H., M.H.



AGUS SUPRIYONO, S.H.

**PEJABAT KEPANITERAAN  
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



**RUDI SAFARI, S.H., M.H.**  
Panitera



**VIRONIKA SRI YULIATI, S.Sos., S.H., M.H.**  
Panitera Muda Perdata



**SUHARNA, S.H., M.H.**  
Panitera Muda Pidana



**EKA SURYA SETIAWAN, S.H.**  
Panitera Muda Hukum

**PEJABAT SEKRETARIATAN  
PENGADILAN NEGERI BANTUL**



**YUYUN FITHRIYAH, SE., Ak.**  
Sekretaris



**NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H.**  
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana



**WIRAWAN DWI ASMARA, SIP**  
Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan



**JOHAN WAHYUDI, S.E.**  
Kasubbag. Umum dan Keuangan

---

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Kebijakan Umum Peradilan .....	1
B. Visi Dan Misi .....	5
C. Rencana Strategis (Renstra) .....	5
BAB II	
A. Keadaan Perkara .....	7
1. Keadaan Perkara yang lalu .....	7
2. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2019 .....	13
3. Keadaan Perkara Perdata Tahun 2019 .....	22
B. Penyelesaian Perkara .....	31
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus .....	31
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu.....	33
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) .....	34
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi .....	36
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi .....	37
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	
1. Posbakum .....	40
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu .....	41
3. Perkara Prodeo .....	41
BAB III Sumber Daya Manusia .....	43
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/ pendidikan .....	43
1. Mutasi .....	50
2. Promosi .....	52
3. Pensiun .....	53
4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti diklat) .....	53
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi .....	54

---

A. Pengelolaan Keuangan .....	54
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....	58
C. Pengelolaan Teknologi Informasi .....	61
1. Implementasi E-Court .....	62
2. Implementasi SIPP .....	63
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik .....	67
A. Akreditasi Penjaminan Mutu .....	67
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .....	68
C. Inovasi Pelayanan Publik .....	69
BAB VI Pengawasan .....	72
A. Internal .....	72
B. Evaluasi .....	73
BAB VII Penutup .....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Rekomendasi .....	75

## Pengantar

**S**yukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga pengadilan Negeri Bantul dapat melewati tahun 2019 dengan lancar sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya telah disusun dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor W13.U/2857/KU.01/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 dengan perihal yang sama.

Dengan berakhirnya tahun 2019 berarti Pengadilan Negeri Bantul telah menyelesaikan kegiatan selama satu tahun dalam upaya untuk mencapai tujuan sesuai renstra sebagai acuannya. Sejumlah capaian dan pelaporan di beberapa bidang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini.

Laporan ini berisi laporan pelaksanaan kegiatan dan tugas peradilan selama tahun 2019 baik di bidang teknis yudisial maupun non yudisial, administrasi kepaniteraan dan sekretariat, bidang pengawasan, serta bidang pembinaan dan pengelolaan.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban secara vertikal kepada Mahkamah Agung, juga sebagai bahan acuan untuk penyempurnaan tugas-tugas di tahun yang akan datang.

Demikian penyusunan laporan ini kami usahakan seobjektif mungkin, namun kami sadar masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan koreksi dan saran dari demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan di masa yang akan datang.



Bantul, 08 Januari 2020  
Pengadilan Negeri Bantul  
Ketua,

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.  
NIP. 19670218 199603 1 001



---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI bahwa setiap satuan kerja diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya secara berjenjang kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi sebagai koordinator di wilayah masing-masing.

Penyampaian laporan dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari kegiatan manajemen yaitu sebagai sarana fungsi pengawasan (*controlling*). Artinya laporan sebagai hasil dari penelaahan pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu dijadikan sebagai acuan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan/ penentu kebijakan guna pelaksanaan kegiatan periode yang akan datang.

Tahapan penyusunan laporan dimulai dari tahapan persiapan berupa monitoring yaitu pengumpulan data laporan dan penyelarasan dengan pedoman pelaksanaan kegiatan. Tahap selanjutnya adalah dilakukan evaluasi atas data yang masuk termasuk didalamnya tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Kemudian tahap terakhir adalah penyusunan dalam bentuk laporan.

#### **B. Kebijakan Umum Peradilan**

Pengadilan Negeri Bantul, Instansi Vertikal di bawah Lembaga Tinggi Negara Bidang Yudikatif Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul dibantu Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama serta Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda, Para Kepala Sub Bagian, Para Panitera Pengganti, Jurusita dan para Staf Pengadilan Negeri Bantul.

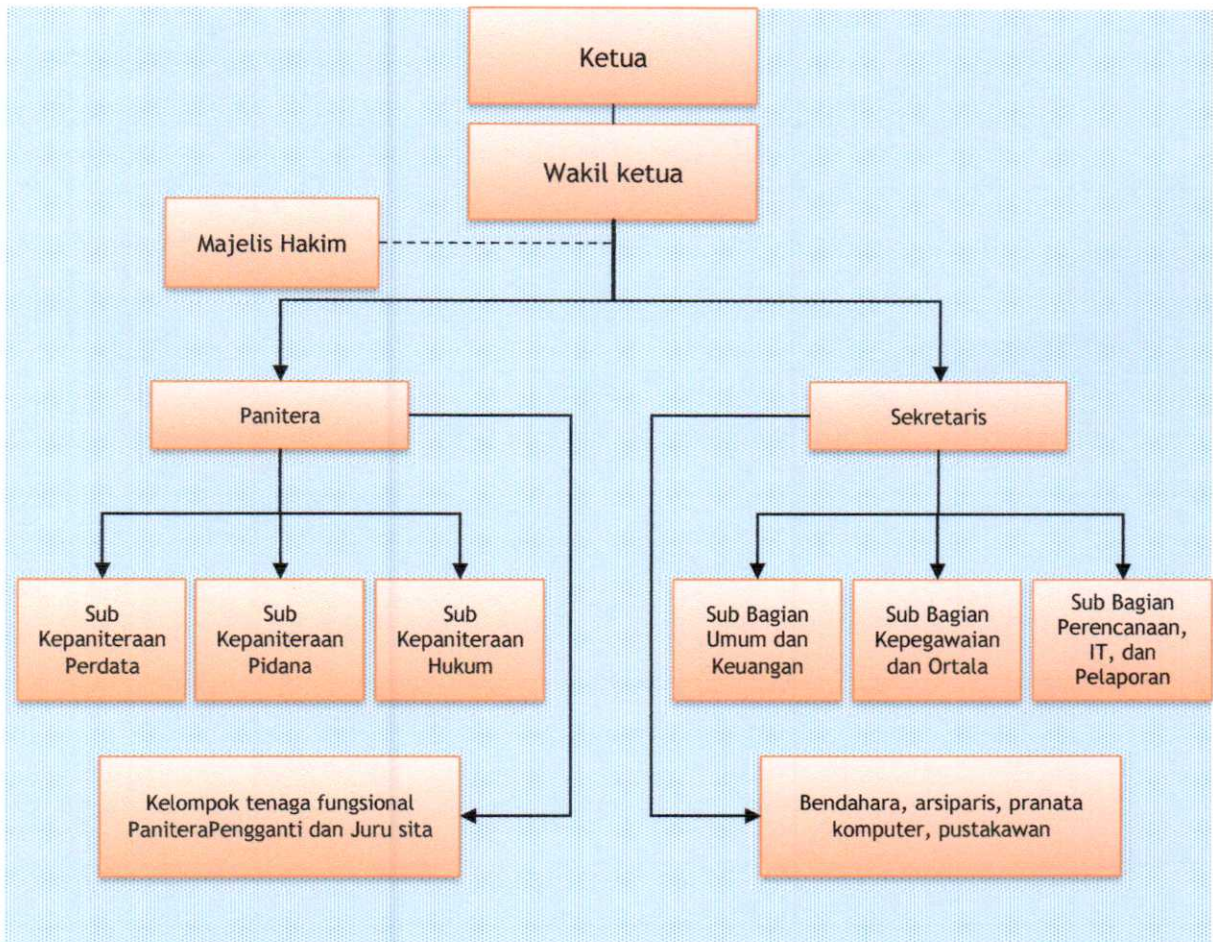
---

Tugas pokok Pengadilan Negeri Bantul adalah menyelenggarakan peradilan di tingkat pertama, yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan. Dalam rangka tugas pokoknya tersebut Pengadilan Negeri Bantul berfungsi sebagai lembaga peradilan yang menjalankan tugas peradilan pada tingkat pertama, yaitu :

- Melayani para pencari keadilan dalam hal perkara yang diajukan dan atau bentuk pelayanan-pelayanan hukum yang lain
- Menerima berkas, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan pada tingkat pertama
- Mengadministrasi setiap perkara baik yang sedang dalam proses maupun perkara yang sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum
- Dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).
- Melaporkan kepada peradilan pada tingkat di atasnya perkembangan perkara yang terjadi pada tingkat pertama

### **STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan organisasi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:



*Gambar Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bantul*

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Bantul berpedoman pada arah kebijakan Mahkamah Agung yang diantaranya tertuang dalam cetak biru Pembaruan Peradilan yang ditargetkan tahun 2010-2035.

Dalam cetak biru tersebut diuraikan beberapa arahan yang akan dicapai oleh badan peradilan Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya. Arahan-arahan tersebut adalah :

1. Arahan pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara
2. Arahan pembaruan fungsi pendukung, meliputi :
  - a. pembaruan fungsi penelitian dan pengembangan
  - b. pengelolaan sumber daya manusia
  - c. pembaruan sistem pendidikan dan pelatihan
  - d. pembaruan pengelolaan anggaran
  - e. pembaruan pengelolaan Aset
  - f. pembaruan Teknologi Informasi

- 
3. Arahan pembaruan akuntabilitas, baik pembaruan sistem pengawasan maupun keterbukaan informasi.

Dalam cetak biru tersebut juga diformulasikan visi dan misi untuk tahun 2010-2035. Visi Mahkamah Agung adalah "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung". Misi Mahkamah Agung adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam rangka mencapai visi dan misi dalam cetak biru pembaruan peradilan tersebut diantaranya adalah dengan mewujudkan Refomasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan empat peradilan di bawahnya. Dalam rangka tersebut Mahkamah Agung telah menyusun dan memetakan 8 (delapan) area perubahan dalam organisasi Mahkamah Agung. Kedelapan area ini akan dilaksanakan hampir bersamaan untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi. Delapan Area tersebut adalah:

- 1) Area I Manajemen Perubahan
- 2) Area II Peraturan Perundang-undangan
- 3) Area III Organisasi
- 4) Area IV Tatalaksana
- 5) Area V Manajemen Sumber Daya Manusia
- 6) Area VI Akuntabilitas
- 7) Area VII Pengawasan
- 8) Area VIII Pelayanan Publik

Hingga saat ini perubahan yang dirasakan sebagai wujud pelaksanaan perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan struktur pengadilan hingga pengadilan tingkat pertama misalnya seperti dipisahkannya antara Panitera dan Sekretaris; kemudian pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai wujud pengelolaan organisasi yang modern dengan di terapkannya berbagai aplikasi terpusat yang berbasis web/ jaringan internet.

Program menengah Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 memiliki beberapa program diantaranya:

- 1) Revolusi mental/perilaku aparatur
- 2) Restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung

- 3) Pengembangan Teknologi Informasi
- 4) Penguatan Pengawasan
- 5) Sumber Daya Manusia Aparatur
- 6) Peningkatan Pelayanan Publik

Keenam program tersebut merupakan program unggulan yang menjadi target terlaksananya program Mahkamah Agung 2015 – 2019 dalam rangka mewujudkan tatanan perubahan sikap mental sumber daya manusia menjadi sumber daya manusia yang profesional dan mempunyai integritas yang tinggi, organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi, birokrasi yang efektif dan efisien, e-government, dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas.

### **C. Visi dan Misi**

Sesuai dengan cetak biru pembaruan peradilan tahun 2010-2035 Mahkamah Agung RI, Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut :

#### **Visi Pengadilan Negeri Bantul adalah:**

”TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BANTUL YANG AGUNG”

#### **Misi Pengadilan Negeri Bantul, adalah:**

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bantul.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bantul
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bantul

### **D. Renstra**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, trasparan dan akuntabel

- 
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
  3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul
  4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sesuai dengan arahan-arahan tertuang dalam cetak biru Pembaruan Peradilan, beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penentuan kebijakan Pengadilan Negeri Bantul adalah :

- perbaikan manajemen perkara yang meliputi kedisiplinan dalam hal pelaporan-pelaporan perkara yang dilakukan secara rutin dan tepat waktu
- perbaikan minutasi perkara
- perbaikan administrasi perkara dan berkas putusan
- peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengikutkan dalam program diklat. Hal ini juga berkaitan dengan regenerasi SDM yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- Penertiban pengelolaan anggaran dan aset
- Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung adanya keterbukaan informasi dan pelayanan publik.
- Sistem pengawasan internal yang telah berjalan masih akan tetap dipertahankan, disamping juga ada pengawasan eksternal yang berasal baik dari badan-badan pemerintah maupun dari organisasi independen.

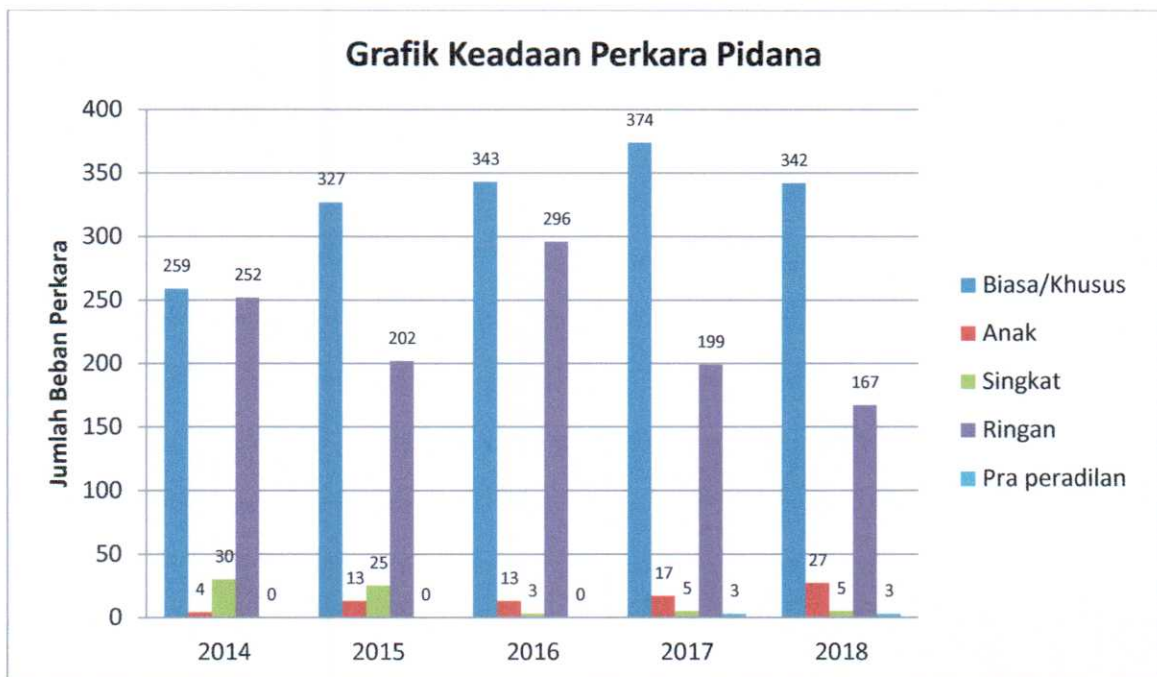
## BAB II KEADAAN PERKARA

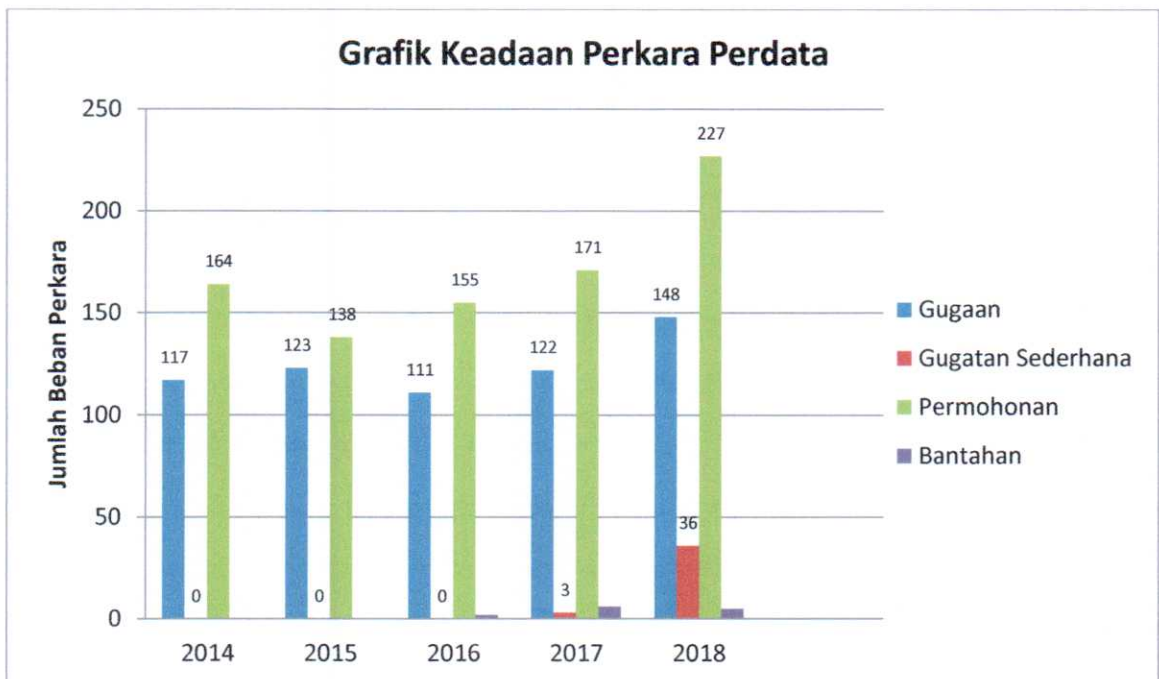
### A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL

#### A.1. Keadaan Perkara Yang Lalu

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Bantul menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata. Perkara Pidana meliputi Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana Cepat, Pidana Lalu Lintas, dan Pra Peradilan. Sedangkan untuk perkara perdata meliputi Perdata Gugatan, Perdata Gugatan Sederhana, dan Perdata Permohonan. Selain penyelesaian perkara-perkara tersebut juga menyelesaikan permohonan upaya hukum mulai dari banding, kasasi, hingga grasi dan Peninjauan Kembali, serta melakukan eksekusi terhadap permohonan eksekusi atas putusan yang sudah BHT.

Seiring dengan fluktuasi penduduk dan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat Bantul, keadaan perkara yang ada di Pengadilan Negeri Bantul juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Berikut adalah perkembangan keadaan perkara di Pengadilan Negeri Bantul selama lima tahun terakhir dari tahun 2014 hingga tahun 2018





Dari grafik tersebut apabila dirinci berdasarkan jenis perkara adalah sebagai berikut:

TAHUN		JENIS PERKARA PIDANA					
		BIASA / KHUSUS	ANAK	SINGKAT	TIPIRING	PRA PERADILAN	LALU LINTAS
2014	SISA AWAL	28	0	0	0	-	0
	MASUK	231	4	30	252	-	12.843
	BEBAN PKR	259	4	30	252	-	12.843



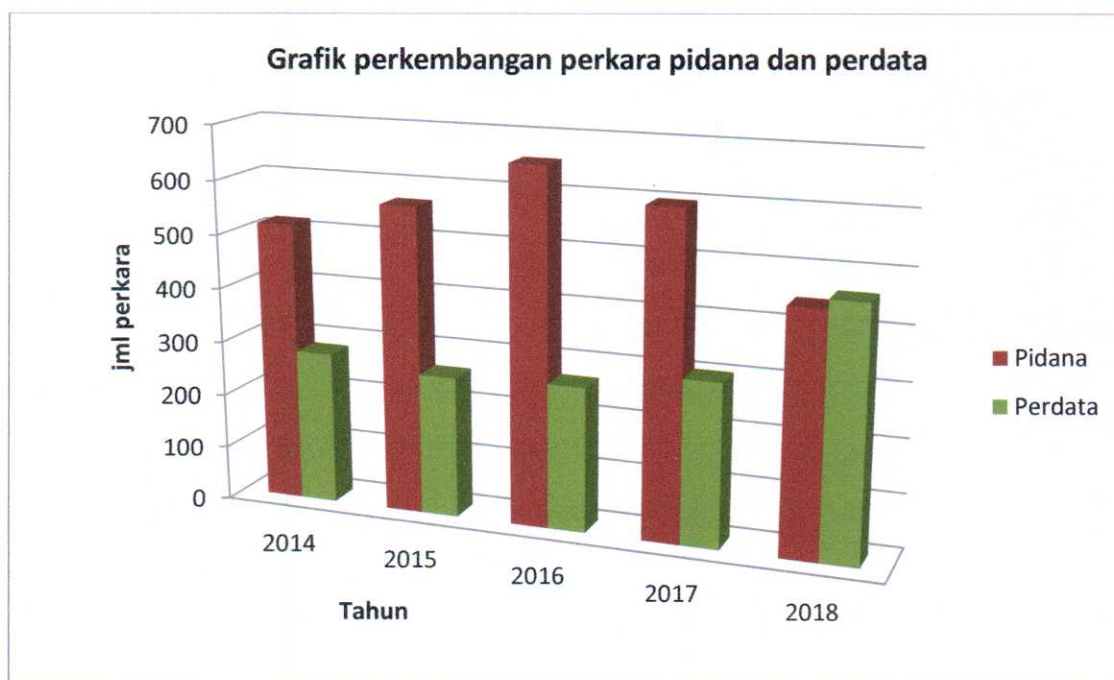
TAHUN		JENIS PERKARA PIDANA					
		BIASA / KHUSUS	ANAK	SINGKAT	TIPIRING	PRA PERADILAN	LALU LINTAS
	PUTUS	225	4	30	252	-	12.843
	SISA AKHIR 2014	34	0	0	0	-	0
2015	SISA AWAL	34	0	0	0	-	0
	MASUK	293	13	25	202	-	19.083
	BEBAN PKR	327	13	25	202	-	19.083
	PUTUS	283	11	25	202	-	19.083
	SISA AKHIR 2015	44	2	0	0	-	0
	SISA AWAL	44	2	0	0	-	0
2016	MASUK	299	11	3	206	-	14.330
	BEBAN PKR	343	13	3	296	-	14.330
	PUTUS	282	11	3	206	-	14.330
	SISA AKHIR 2016	61	2	0	0	-	0
	SISA AWAL	61	2	0	0	0	0
2017	MASUK	313	15	5	199	3	24.337
	BEBAN PKR	374	17	5	199	3	24.337
	PUTUS	328	17	5	199	3	24.337
	SISA AKHIR 2017	46	0	0	0	0	0
	SISA AWAL	46	0	0	0	0	0
2018	MASUK	296	27	5	167	3	25.371
	BEBAN PKR	342	27	5	167	3	25.371
	PUTUS	297	26	5	167	3	25.371
	SISA AKHIR 2018	45	1	0	0	0	0
	SISA AWAL	45	1	0	0	0	0

TAHUN		JENIS PERKARA			
		GUGATAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN	BANTAHAN
2014	SISA AWAL	43	0	3	-
	MASUK	74	0	161	-
	BEBAN PKR	117	0	164	-
	PUTUS	83	0	163	-
	SISA AKHIR 2014	34	0	1	-
2015	SISA AWAL	34	0	1	-
	MASUK	89	0	137	-

TAHUN	JENIS PERKARA				
	GUGATAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN	BANTAHAN	
	BEBAN PKR	123	0	138	-
	PUTUS	92	0	135	-
	SISA AKHIR 2015	31	0	3	-
2016	SISA AWAL	31	0	3	-
	MASUK	80	0	152	2
	BEBAN PKR	111	0	155	2
	PUTUS	75	0	151	1
	SISA AKHIR 2016	36	0	4	1
2017	SISA AWAL	36	0	4	1
	MASUK	86	3	167	5
	BEBAN PKR	122	3	171	6
	PUTUS	87	0	167	4
	SISA AKHIR 2017	35	3	4	2
2018	SISA AWAL	35	3	4	2
	MASUK	113	33	227	3
	BEBAN PKR	148	36	227	5
	PUTUS	103	33	222	5
	SISA AKHIR 2018	45	3	9	0

Jika masing-masing jenis perkara digabungkan (kecuali pidana lalu lintas) maka akan diperoleh tabel sebagai berikut:

	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Pidana</b>	517	567	655	598	444
<b>Perdata</b>	281	261	268	302	461



Dari tabel tersebut, dalam lima tahun terakhir antara tahun 2014 hingga 2018, perkara pidana paling banyak di tahun 2016 dengan jumlah beban 655 perkara yang diproses. Sedangkan untuk perkara perdata tertinggi adalah di tahun 2018 dengan jumlah beban 461 perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Bantul.

Data keadaan perkara upaya hukum yang diajukan di Pengadilan Negeri Bantul selama jangka waktu tiga tahun terakhir adalah

TAHUN		JENIS UPAYA HUKUM PIDANA			
		BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	GRASI
2016	SISA AWAL	6	26	3	2
	MASUK	17	7	1	0
	PUTUS	21	21	2	0
	CABUT	0	0	0	0
	SISA AKHIR 2016	2	12	2	2
2017	SISA AWAL	2	12	2	2
	MASUK	21	15	0	0
	PUTUS	19	12	2	2
	CABUT	0	0	0	0
	SISA AKHIR 2017	4	15	0	0
2018	SISA AWAL	4	15	0	0
	MASUK	17	5	0	0
	PUTUS	19	4	0	0

TAHUN		JENIS UPAYA HUKUM PIDANA			
		BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	GRASI
	CABUT	0	0	0	0
	SISA AKHIR 2018	2	16	0	0

TAHUN		JENIS UPAYA HUKUM PERDATA			
		BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	EKSEKUSI
2016	SISA AWAL	4	27	3	37
	MASUK	13	7	1	20
	PUTUS	11	14	3	9
	CABUT	2	2	0	11
	SISA AKHIR 2016	4	18	1	37
2017	SISA AWAL	4	18	1	37
	MASUK	26	9	2	22
	PUTUS	20	3	0	5
	CABUT	0	0	0	15
	SISA AKHIR 2017	10	24	2	39
2018	SISA AWAL	10	24	2	39
	MASUK	41	8	1	23
	PUTUS	43	8	1	9
	CABUT	2	1	0	5
	SISA AKHIR 2018	6	23	2	48

Berdasarkan tabel tersebut di atas perbandingan antara perkara yang diputus dengan upaya hukum banding yang diajukan oleh para pihak adalah sebagai berikut



Persentase yang mengajukan upaya hukum banding rata-rata adalah 4,3 persen untuk perkara pidana dan 11 persen untuk perkara perdata

## A.2. Laporan Keadaan Perkara Pidana Tahun 2019

Rekapitulasi Keadaan Perkara pidana diputus tahun 2019 diperinci berdasarkan jenis perkara, yaitu perkara pidana Biasa/Khusus, Pidana Khusus Anak, Pidana Singkat, Tindak Pidana Ringan / Cepat (Tipiring), Pidana Pra Peradilan dan Pidana lalu Lintas. Terdapat sisa dan masuk serta putus selama tahun 2019.

Pada tahun 2019 terdapat kenaikan jumlah perkara masuk pada jenis perkara pidana biasa/khusus yaitu dari jumlah 296 perkara pada tahun 2018 menjadi 358 perkara pada tahun 2019. Untuk perkara pidana singkat terjadi penurunan jumlah perkara masuk yaitu dari 5 perkara pada tahun 2018 menjadi 1 perkara pada tahun 2019. Perkara pidana anak turun dari

27 perkara di tahun 2018 menjadi 10 perkara di tahun 2019. Perkara lalu lintas mengalami kenaikan dari 25.371 perkara pada tahun 2018 menjadi 30.381 perkara di tahun 2019. Pada perkara pidana ringan/cepat jumlah perkara turun dari 167 perkara pada tahun 2018 menjadi 101 perkara di tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2019 ini perkara pra peradilan turun dari 3 perkara pada tahun 2018 menjadi 1 perkara pada tahun 2019.

TAHUN		JENIS PERKARA					
		BIASA / KHUSUS	ANAK	SINGKAT	TIPIRING	PRA PERADILAN	LALU LINTAS
2014	SISA AWAL	28	0	0	0	-	0
	MASUK	231	4	30	252	-	12.843
	PUTUS	225	4	30	252	-	12.843
	SISA AKHIR 2014	34	0	0	0	-	0
2015	SISA AWAL	34	0	0	0	-	0
	MASUK	293	13	25	202	-	19.083
	PUTUS	283	11	25	202	-	19.083
	SISA AKHIR 2015	44	2	0	0	-	0
2016	SISA AWAL	44	2	0	0	-	0
	MASUK	299	11	3	206	-	14.330
	PUTUS	282	11	3	206	-	14.330
	SISA AKHIR 2016	61	2	0	0	-	0
2017	SISA AWAL	61	2	0	0	0	0
	MASUK	313	15	5	199	3	24.337
	PUTUS	328	17	5	199	3	24.337
	SISA AKHIR 2017	46	0	0	0	0	0
2018	SISA AWAL	46	0	0	0	0	0
	MASUK	296	27	5	167	3	25.371
	PUTUS	297	26	5	167	3	25.371
	SISA AKHIR 2018	45	1	0	0	0	0
2019	SISA AWAL	45	1	0	0	0	0
	MASUK	358	10	1	101	1	30.381
	PUTUS	350	10	1	101	1	30.381
	SISA AKHIR 2019	53	1	0	0	0	0

*Tabel Rekapitulasi perkara pidana dari tahun 2014 s.d. 2019*

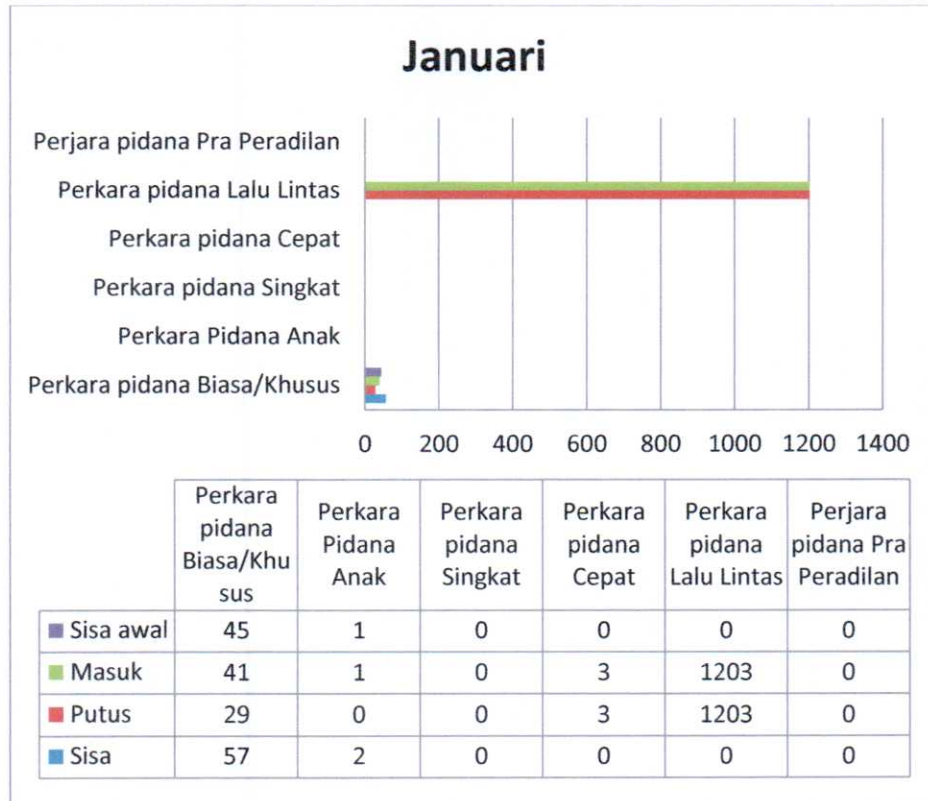
Untuk perkara pidana yang dimohonkan upaya hukum di Pengadilan Negeri Bantul cenderung mengalami kenaikan. Perkara yang dimohonkan banding mengalami kenaikan dari

17 perkara pada tahun 2018 menjadi 19 perkara pada tahun 2019. Perkara yang dimohonkan kasasi mengalami kenaikan dari 5 perkara tahun 2018 menjadi 8 perkara pada tahun 2019. Sedangkan untuk upaya hukum peninjauan kembali dan grasi tidak ada permohonan. Berikut tabel rekapitulasi perkara pidana yang dimohonkan banding dari tahun 2017 s.d. 2019 :

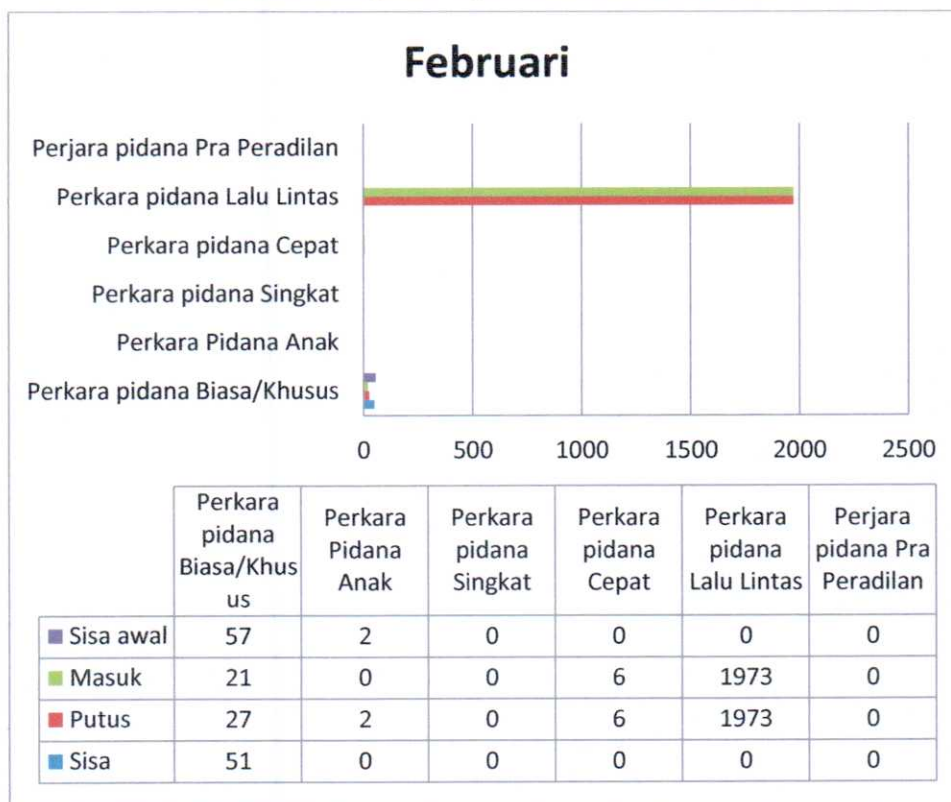
TAHUN		JENIS UPAYA HUKUM			
		BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	GRASI
2017	SISA AWAL	2	6	2	2
	MASUK	24	16	0	0
	PUTUS	19	16	2	2
	CABUT	0	0	0	0
	SISA AKHIR 2017	5	6	0	0
2018	SISA AWAL	5	6	0	0
	MASUK	17	5	0	0
	PUTUS	18	8	0	0
	CABUT	0	0	0	0
	SISA AKHIR 2018	4	3	0	0
2019	SISA AWAL	4	3	0	0
	MASUK	19	8	0	0
	PUTUS	16	2	0	0
	CABUT	1	0	0	0
	SISA AKHIR 2019	6	9	0	0

*Tabel Rekapitulasi perkara pidana dari tahun 2017 s.d. 2019*

Lebih detil data per bulan keadaan perkara pidana biasa, anak, singkat, dan cepat pada Pengadilan Negeri Bantul dalam kurung waktu satu tahun pada tahun 2019 dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut :

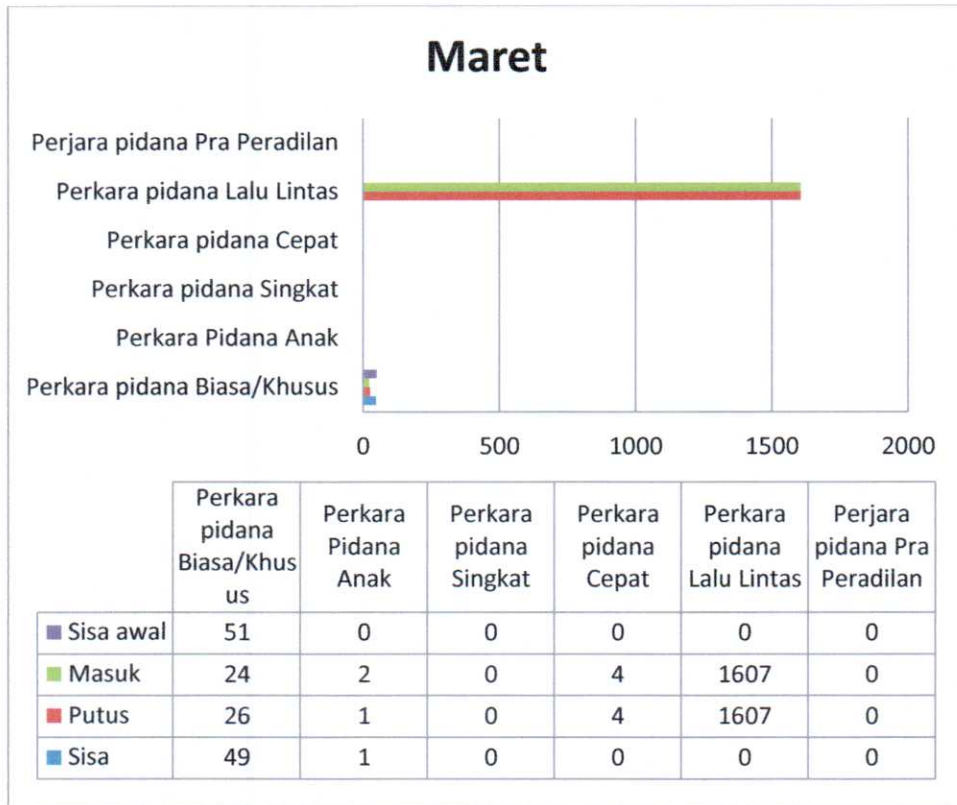


*Grafik keadaan perkara pidana bulan Januari 2019*

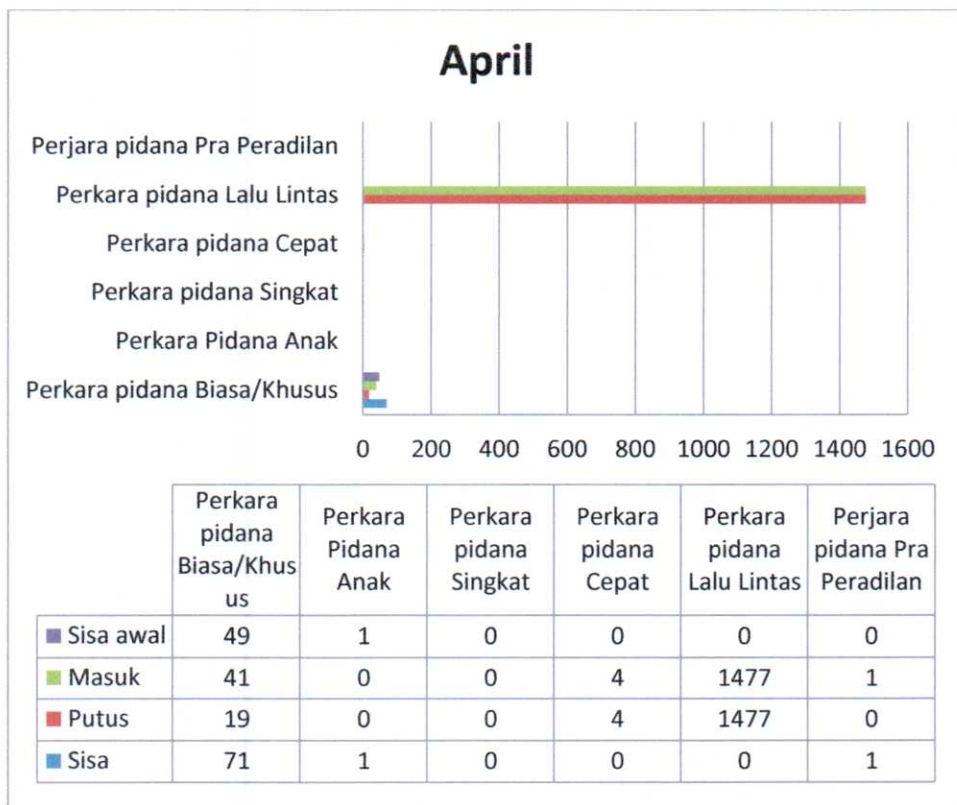


*Grafik keadaan perkara pidana bulan Februari 2019*

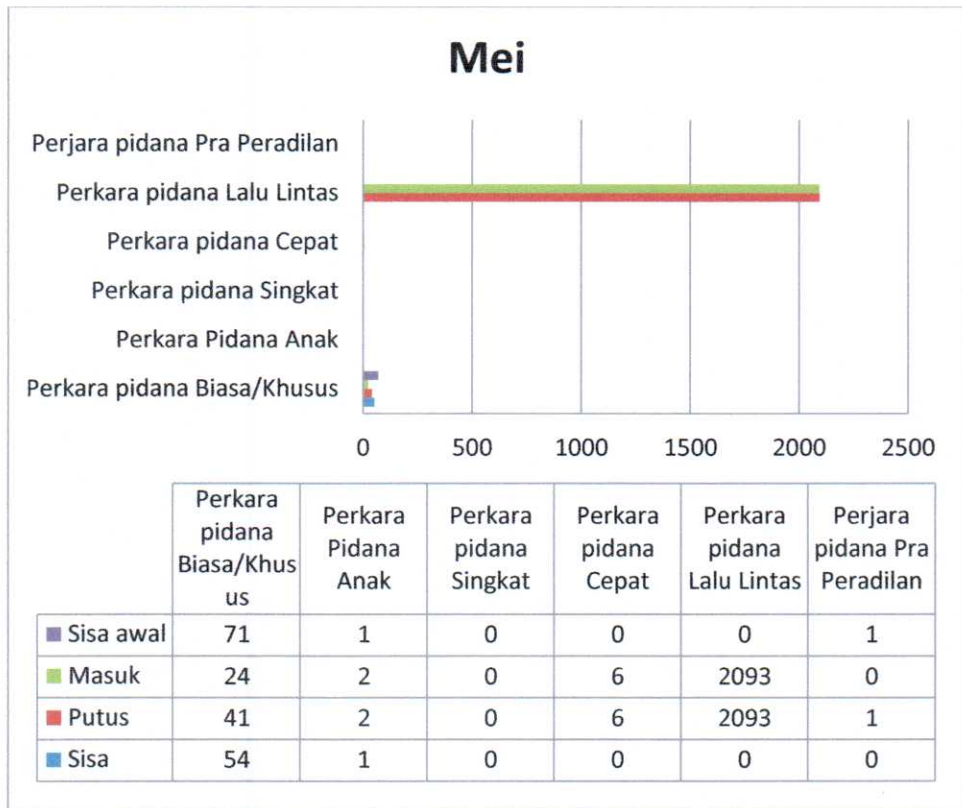




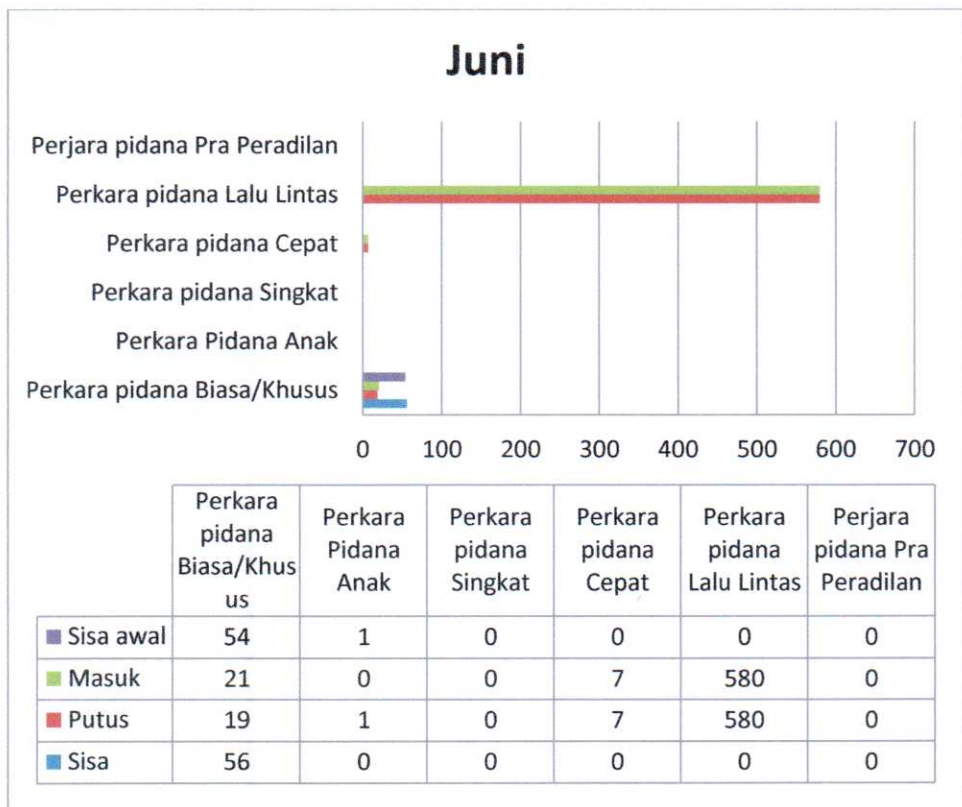
*Grafik keadaan perkara pidana bulan Maret 2019*



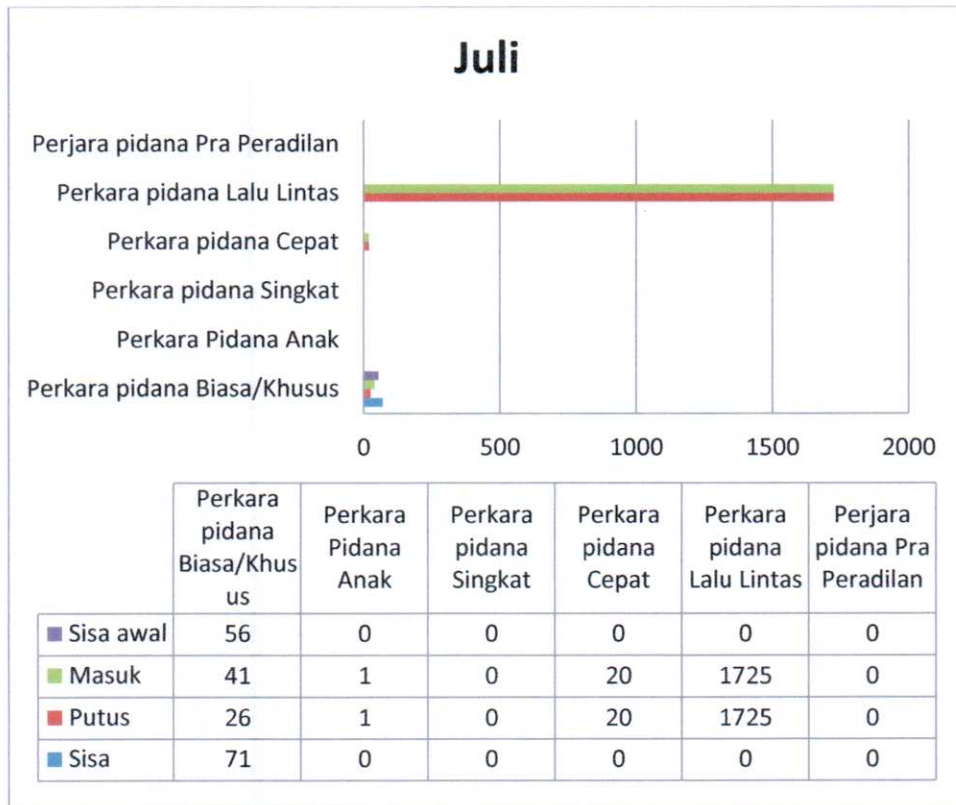
*Grafik keadaan perkara pidana bulan April 2019*



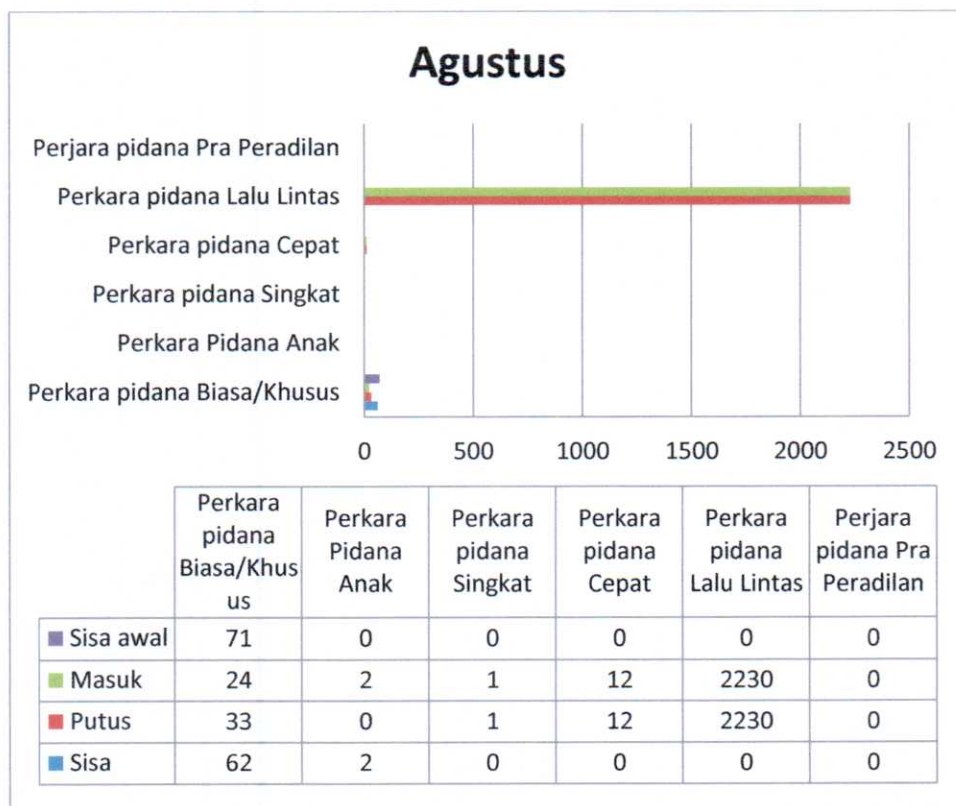
*Grafik keadaan perkara pidana bulan Mei 2019*



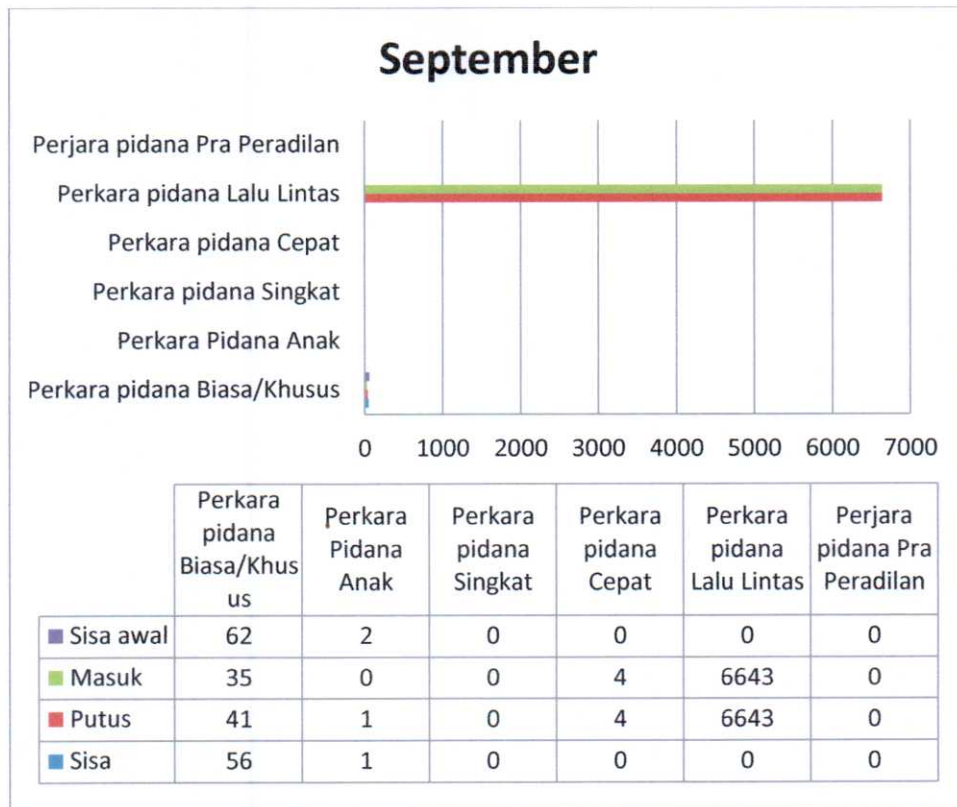
*Grafik keadaan perkara pidana bulan Juni 2019*



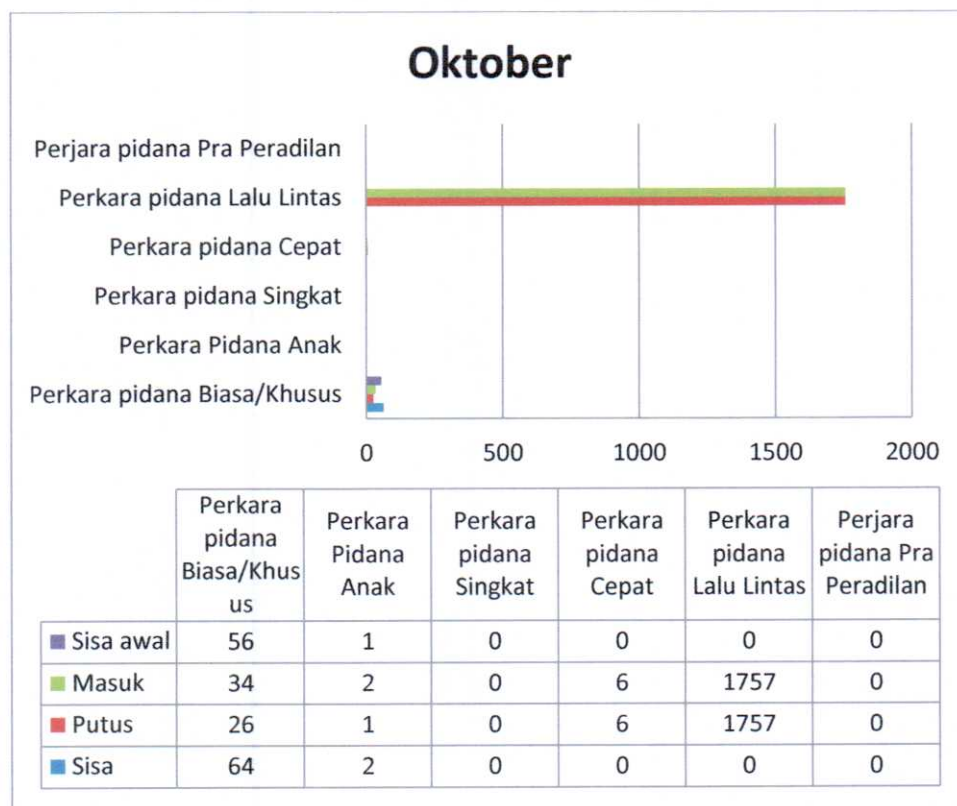
*Grafik keadaan perkara pidana bulan Juli 2019*



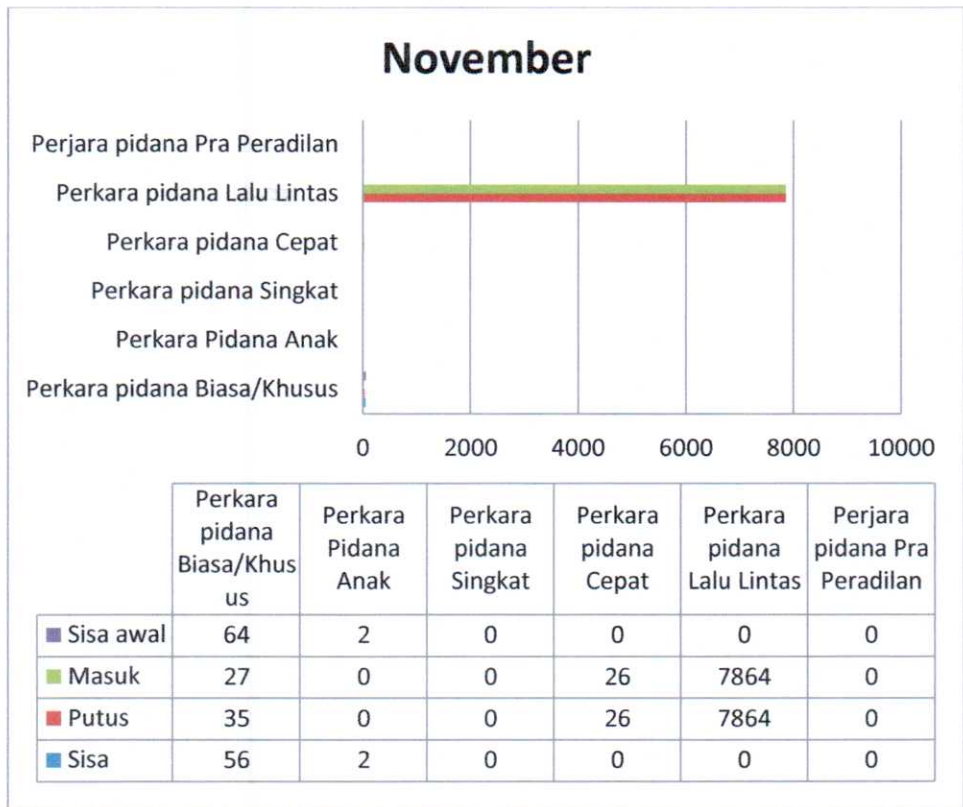
*Grafik keadaan perkara pidana bulan Agustus 2019*



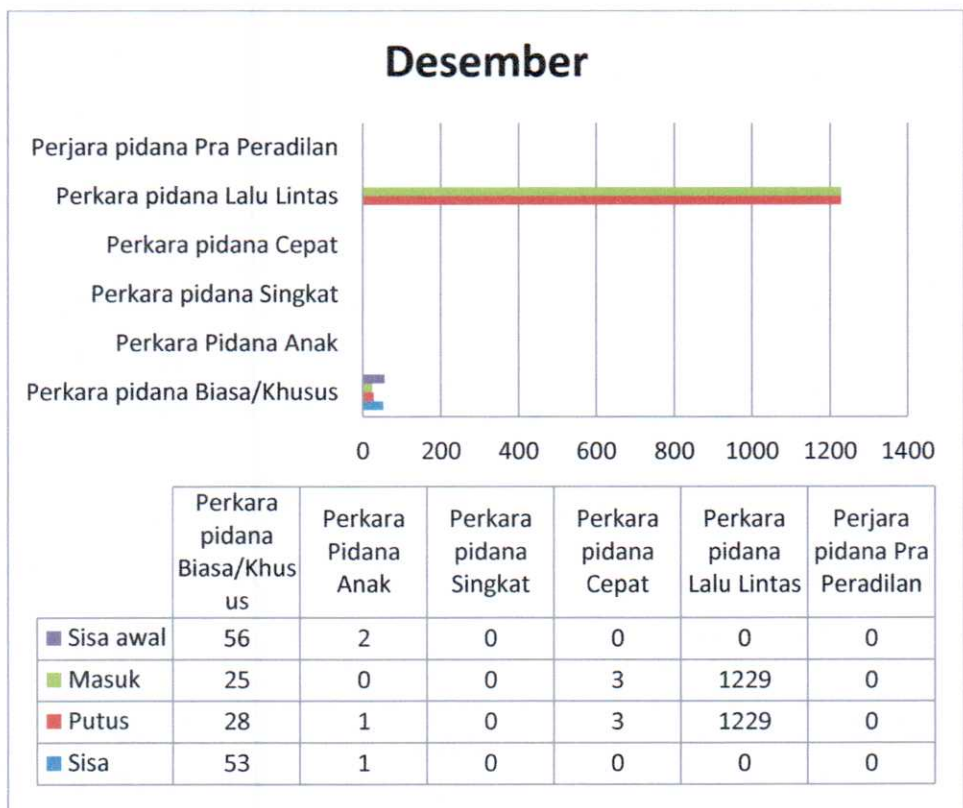
*Grafik keadaan perkara pidana bulan September 2019*



*Grafik keadaan perkara pidana bulan Oktober 2019*



*Grafik keadaan perkara pidana bulan November 2019*



*Grafik keadaan perkara pidana bulan Desember 2019*

### A.3. Laporan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2019

Rekapitulasi Keadaan perkara Perdata selama Tahun 2019 juga diperinci berdasarkan jenis perkara yang ada dalam perkara perdata. Jenis perkara perdata dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu jenis perkara perdata Gugatan/Bantahan, perkara perdata Gugatan Sederhana dan jenis perkara perdata Permohonan. Sebagaimana perkara pidana, pelaporan rekapitulasi perkara perdata juga terdapat sisa perkara, jumlah perkara masuk dan perkara yang putus selama tahun 2019.

Terdapat perubahan Jumlah perkara perdata pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 perkara gugatan yang masuk pada Pengadilan Negeri Bantul sejumlah 116, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 114 perkara. Perkara Gugatan Sederhana terjadi kenaikan jumlah perkara masuk yang pada tahun 2018 hanya terdapat 33 perkara maka pada tahun 2019 ini terdapat 81 perkara gugatan sederhana yang masuk. Sementara untuk perkara permohonan mengalami kenaikan yang pada tahun 2018 sejumlah 227 perkara menjadi 493 perkara masuk pada tahun 2019.

TAHUN		JENIS PERKARA		
		GUGATAN / BANTAHAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN
2014	SISA AWAL	43	0	3
	MASUK	74	0	161
	PUTUS	83	0	163
	SISA AKHIR 2014	34	0	1
2015	SISA AWAL	34	0	1
	MASUK	89	0	137
	PUTUS	92	0	135
	SISA AKHIR 2015	31	0	3
2016	SISA AWAL	31	0	3
	MASUK	82	0	152
	PUTUS	76	0	151
	SISA AKHIR 2016	37	0	4
2017	SISA AWAL	37	0	4
	MASUK	91	3	167
	PUTUS	91	0	167
	SISA AKHIR 2017	37	3	4
2018	SISA AWAL	37	3	4
	MASUK	116	33	227

TAHUN	JENIS PERKARA			
	GUGATAN / BANTAHAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN	
	PUTUS	108	33	222
	SISA AKHIR 2018	45	3	9
2019	SISA AWAL	45	3	9
	MASUK	114	81	493
	PUTUS	103	76	483
	SISA AKHIR 2019	56	8	19

*Tabel Rekapitulasi perkara perdata dari tahun 2014 s.d. 2019*

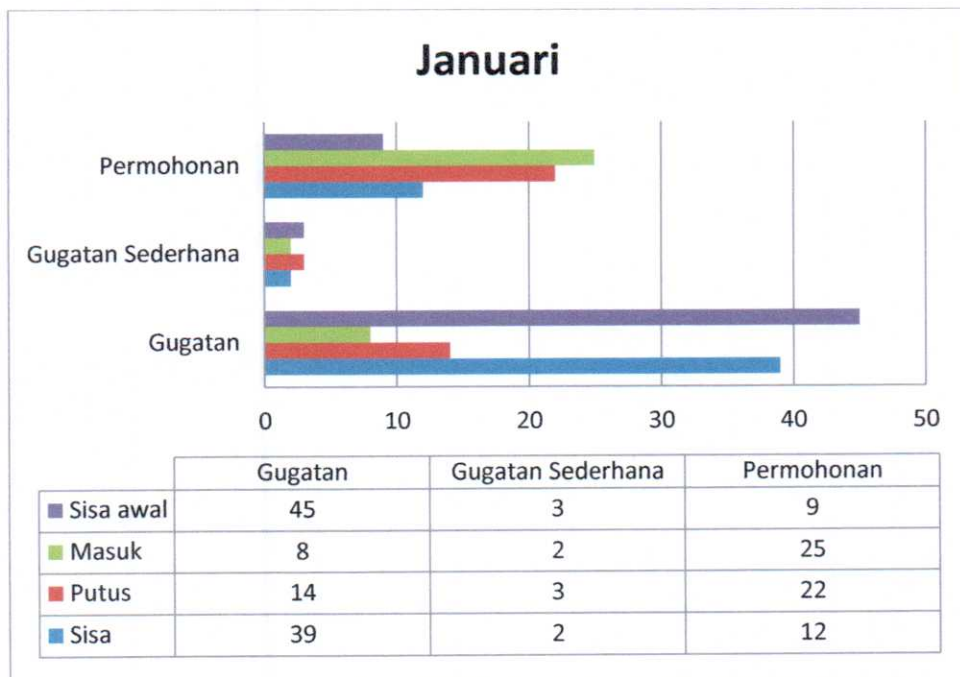
Sedangkan untuk perkara perdata yang dimohonkan upaya hukum di Pengadilan Negeri Bantul cenderung mengalami kenaikan. Perkara yang dimohonkan banding mengalami kenaikan dari 26 perkara pada tahun 2017 menjadi 41 perkara pada tahun 2018. Perkara yang dimohonkan kasasi mengalami penurunan dari 9 perkara tahun 2017 menjadi 8 perkara pada tahun 2018. Pada tahun 2018 terdapat 1 perkara yang dimohonkan Peninjauan kembali. Untuk pencatatan perkara eksekusi masuk pada tahun 2017 sejumlah 22 perkara dan terjadi kenaikan jumlah perkara eksekusi masuk tahun 2018 sejumlah 23 perkara. Berikut tabel rekapitulasi perkara perdata yang dimohonkan banding dari tahun 2017 s.d. 2019 :

TAHUN	JENIS UPAYA HUKUM				
	BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	EKSEKUSI	
2017	SISA AWAL	4	7	1	37
	MASUK	26	9	2	22
	PUTUS	20	10	0	5
	CABUT	0	0	0	15
	SISA AKHIR 2017	10	6	2	39
2018	SISA AWAL	10	6	2	39
	MASUK	41	8	1	23
	PUTUS	43	8	1	9
	CABUT	2	1	0	5
	SISA AKHIR 2018	6	5	2	48
2019	SISA AWAL	6	5	2	48
	MASUK	21	17	3	15
	PUTUS	23	2	0	7
	CABUT	0	0	0	13

TAHUN	JENIS UPAYA HUKUM			
	BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	EKSEKUSI
SISA AKHIR 2019	4	20	5	43

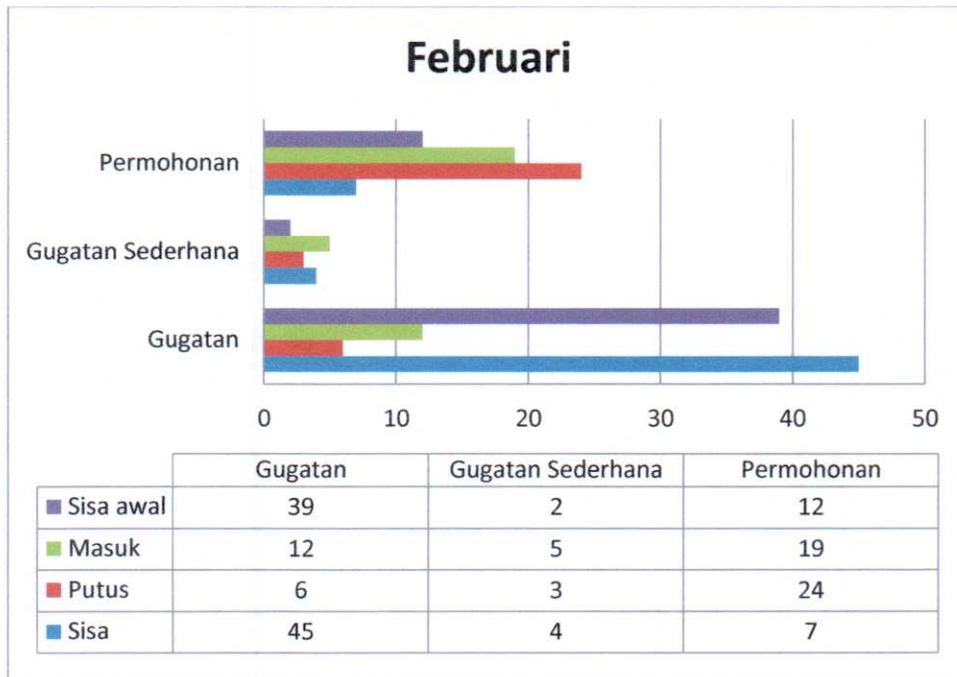
*Tabel Rekapitulasi perkara perdata yang dimohonkan banding dari tahun 2017 s.d. 2019*

Lebih lanjut, untuk data per bulan keadaan perkara perdata gugatan, gugatan sederhana, dan permohonan pada Pengadilan Negeri Bantul dalam kurung waktu satu tahun pada tahun 2019 dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut :

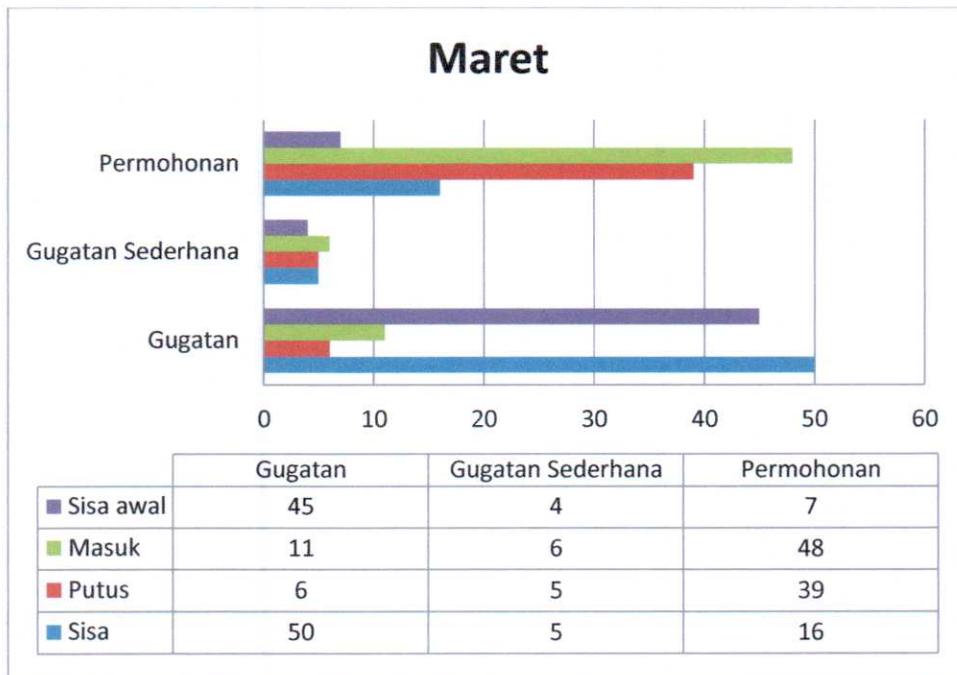


*Grafik keadaan perkara perdata bulan Januari 2019*

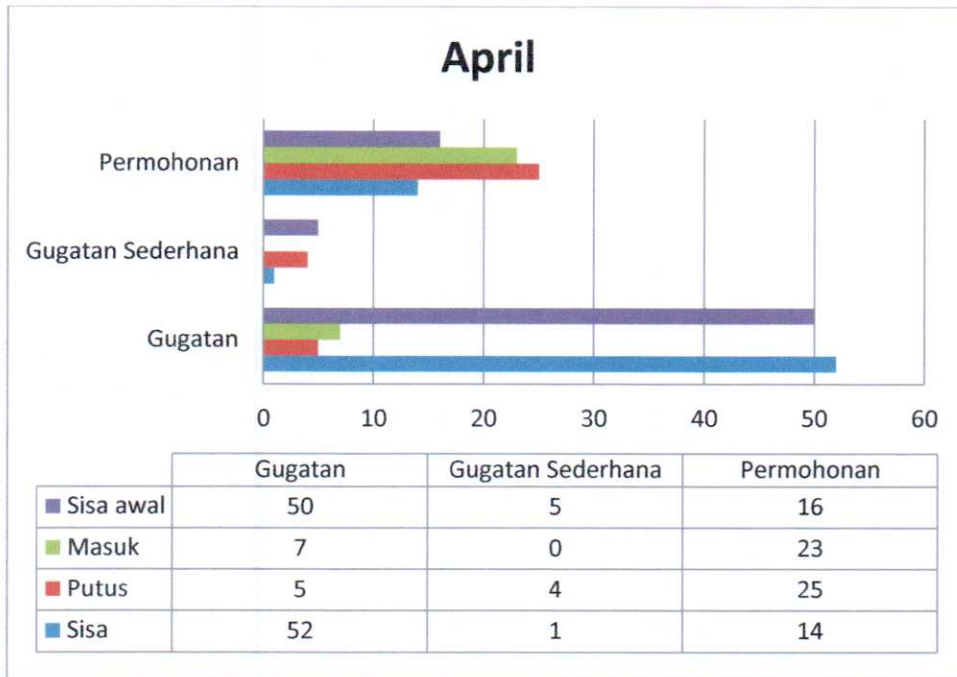




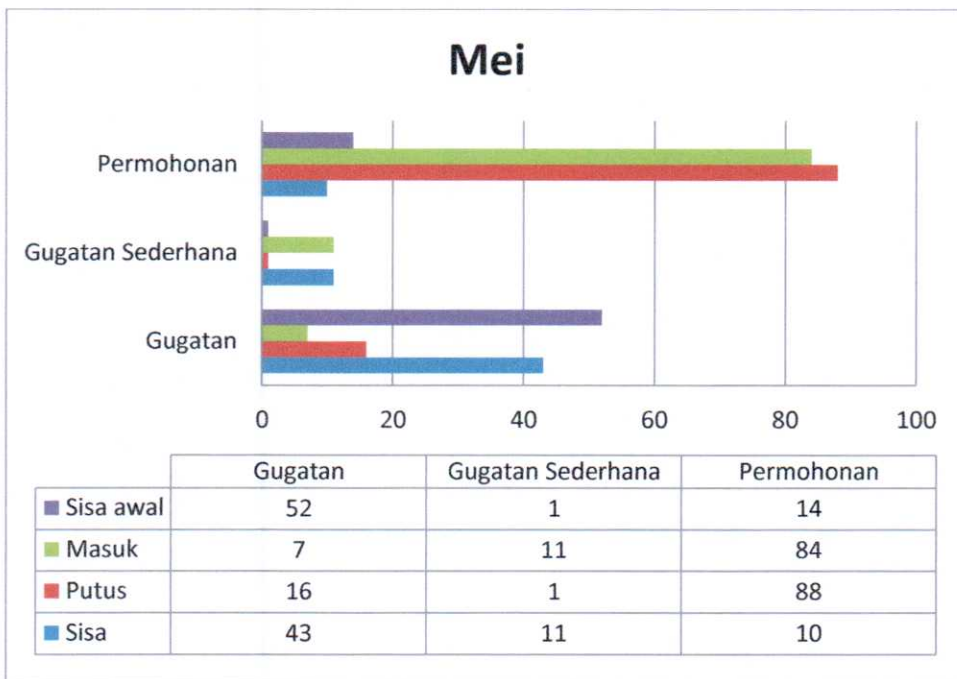
*Grafik keadaan perkara perdata bulan Februari 2019*



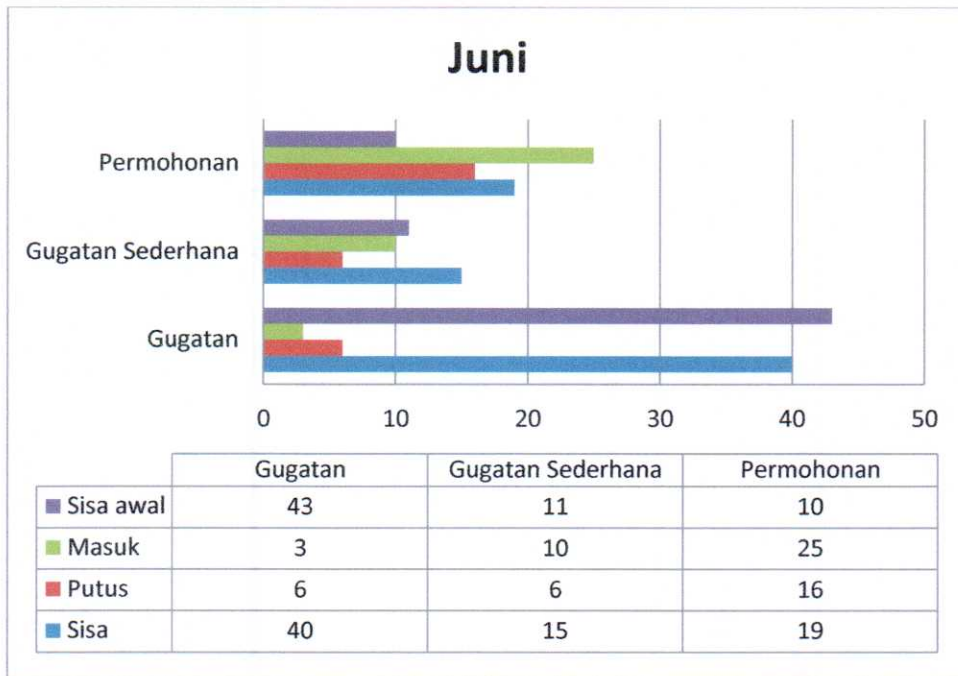
*Grafik keadaan perkara perdata bulan Maret 2019*



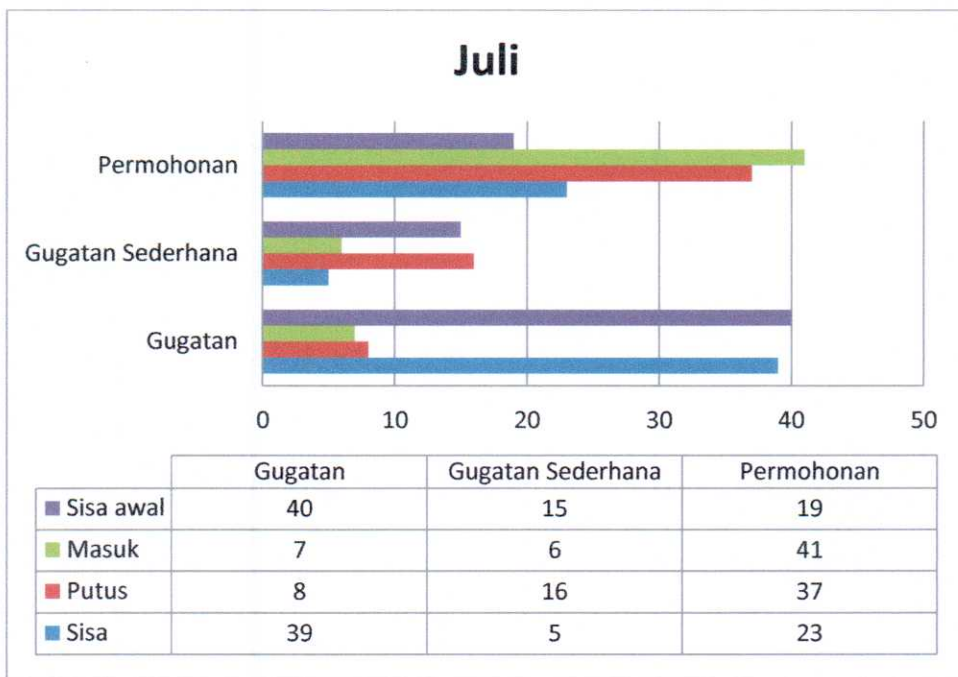
*Grafik keadaan perkara perdata bulan April 2019*



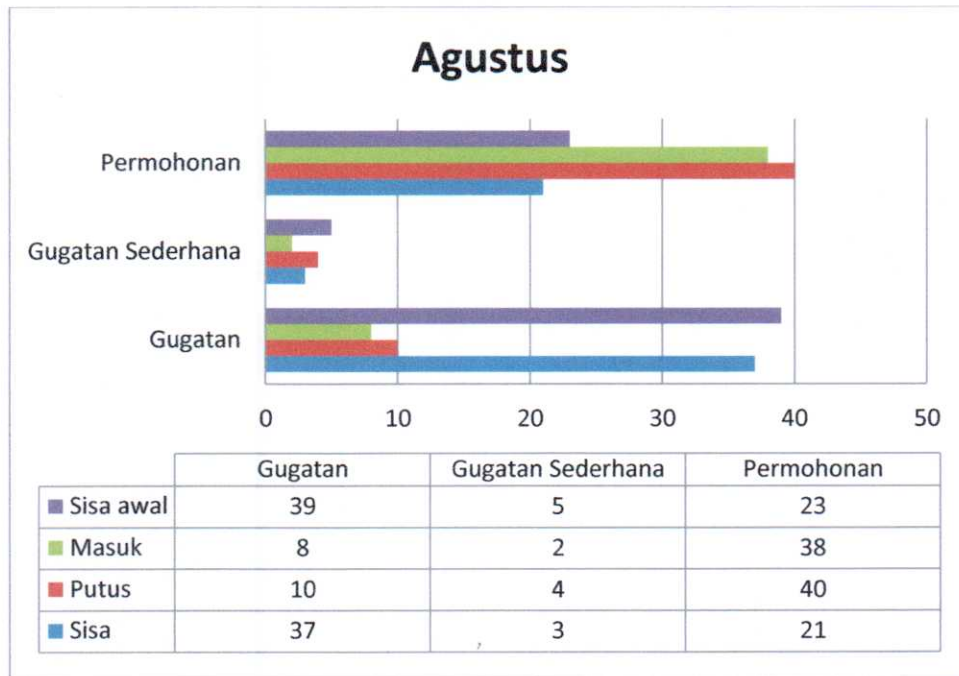
*Grafik keadaan perkara perdata bulan Mei 2019*



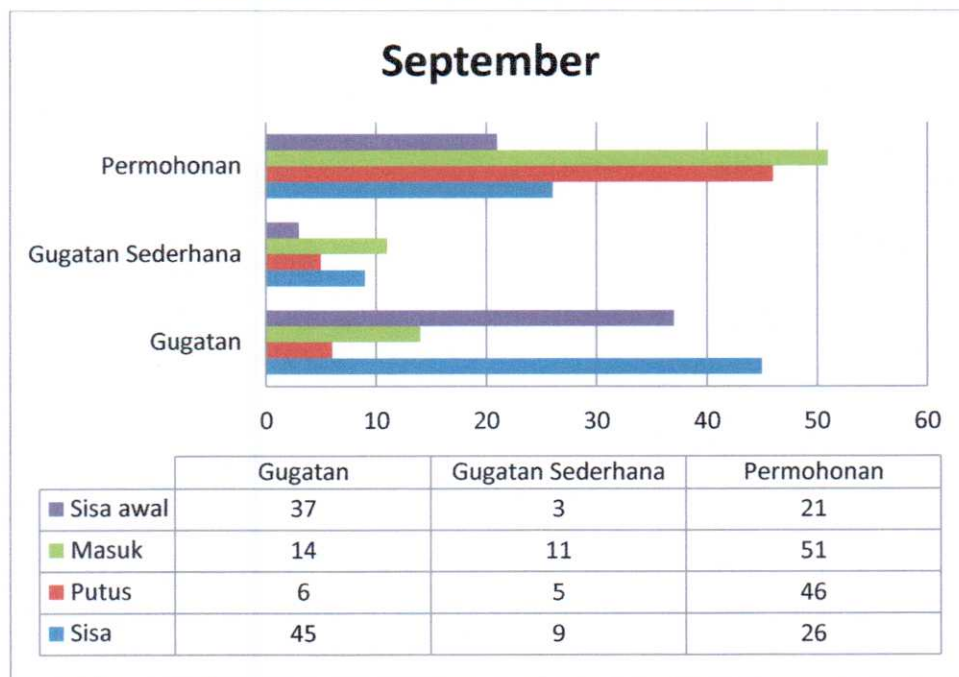
*Grafik keadaan perkara perdata bulan Juni 2019*



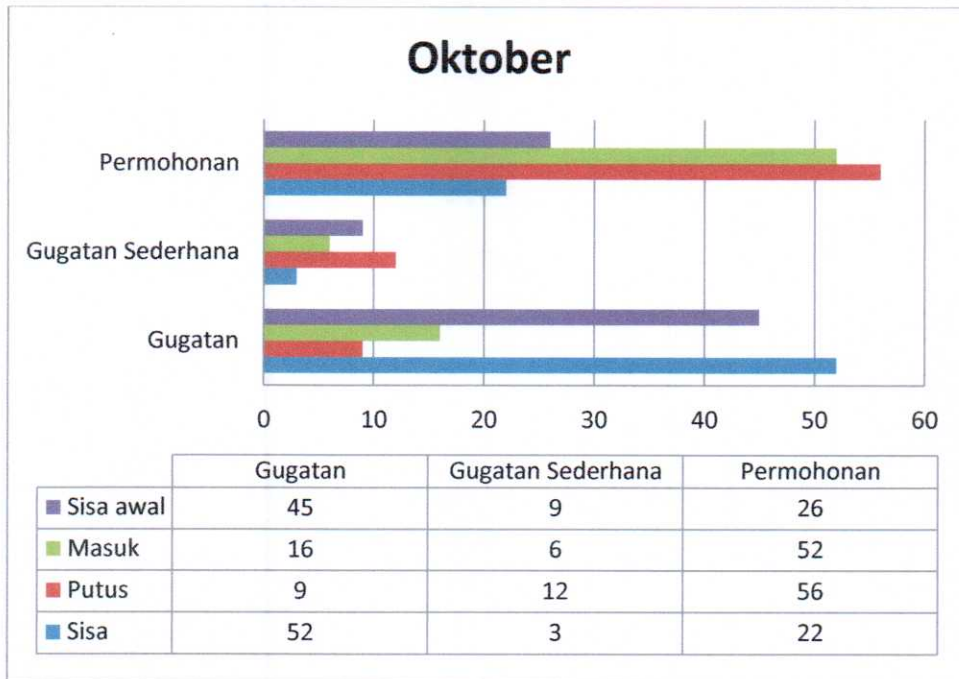
*Grafik keadaan perkara perdata bulan Juli 2019*



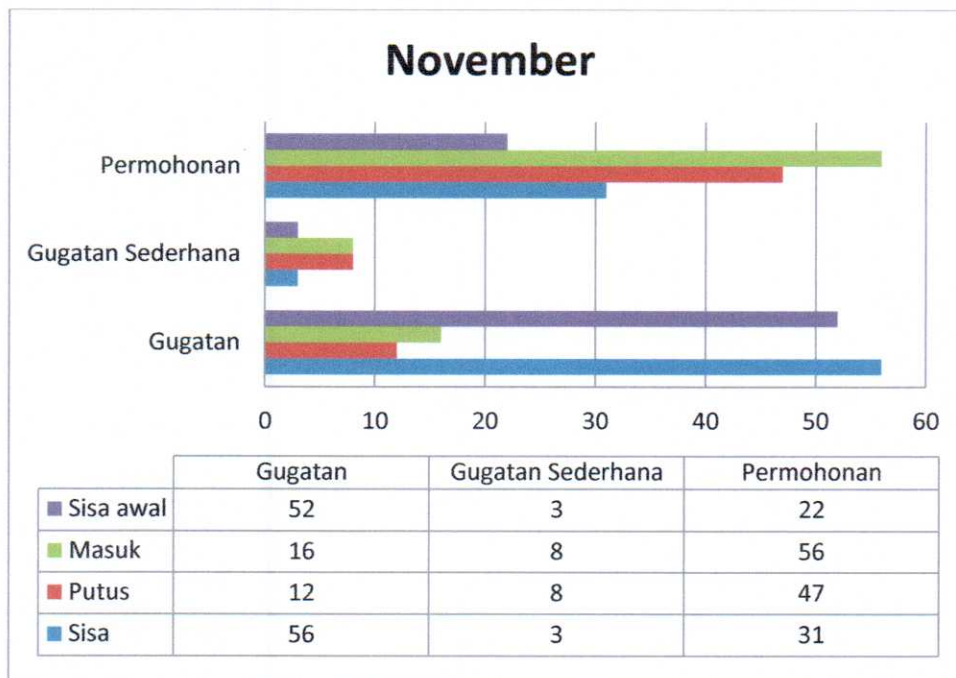
*Grafik keadaan perkara perdata bulan Agustus 2019*



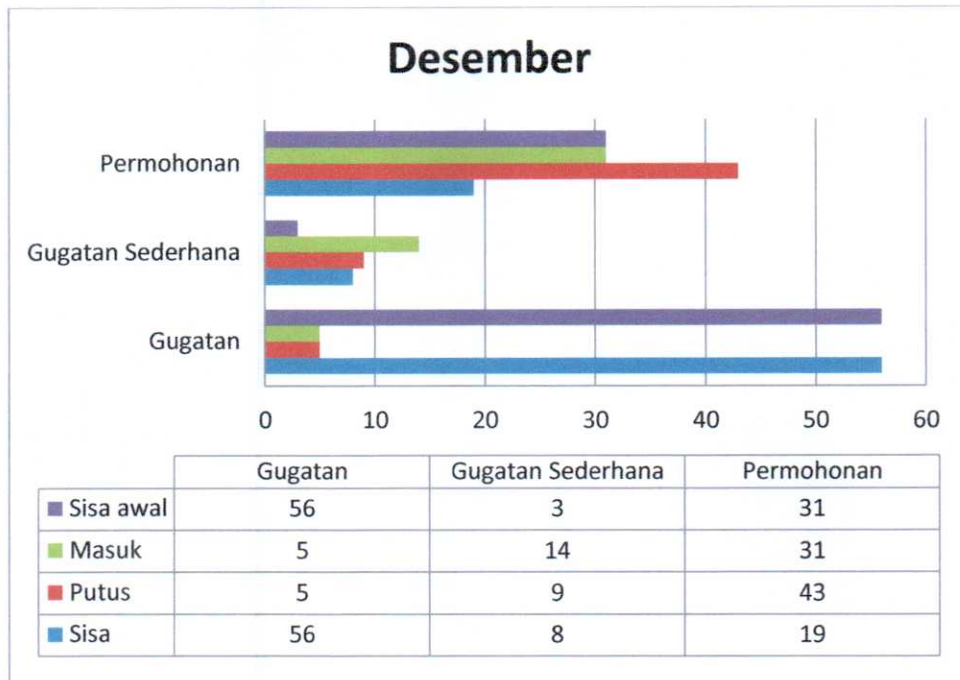
*Grafik keadaan perkara perdata bulan September 2019*



*Grafik keadaan perkara perdata bulan Oktober 2019*



*Grafik keadaan perkara perdata bulan November 2019*



*Grafik keadaan perkara perdata bulan Desember 2019*

## B. Penyelesaian Perkara

### 1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara yang diputus adalah jumlah penyelesaian sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan pada tahun ini. Artinya adalah jumlah perkara-perkara sisa tahun 2018 yang diselesaikan di tahun 2019. Data berikut juga menyajikan perkembangan sisa perkara pada setiap akhir tahun selama tiga tahun terakhir. Target yang akan dicapai berkaitan dengan sisa perkara adalah mereduksi jumlah sisa perkara setiap tahun, yaitu dengan meningkatkan kinerja penyelesaian perkara.

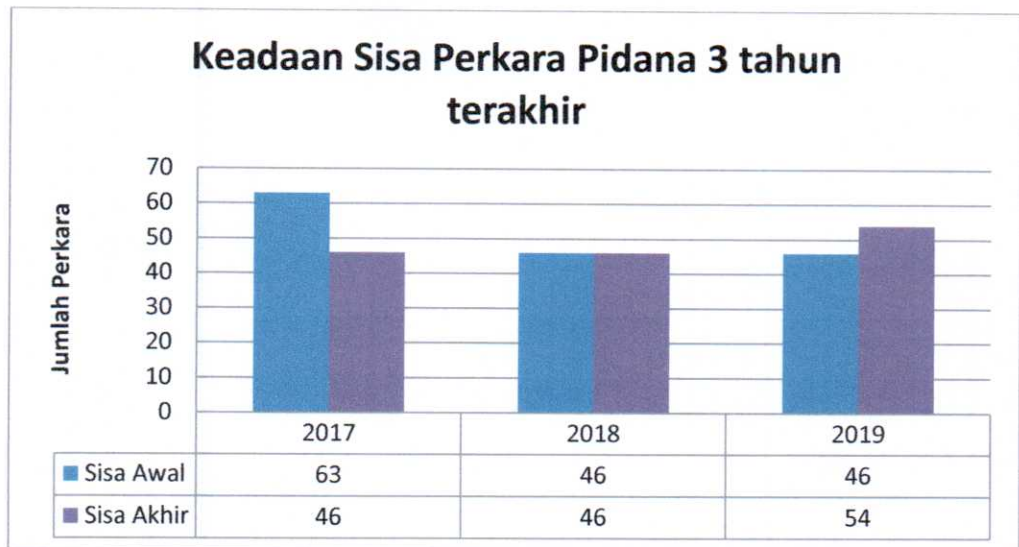
No	Jenis Perkara	Pengadilan Negeri Bantul		
		Sisa Perkara Tahun 2018	Sisa Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara
1.	Perdata Gugatan	45	45	0
2.	Perdata Permohonan	9	9	0
3.	Perdata Gugatan Sederhana	3	3	0
4.	Perdata Eksekusi	48	15	33
5.	Perlawanan/bantahan	0	0	0
6.	Pidana Biasa	45	45	0
7.	Pidana Singkat	0	0	0
8.	Pidana Tipiring/Cepat	0	0	0
9.	Pidana Lalu-Lintas	0	0	0
10.	Pidana Anak	1	1	0
11.	Pidana Praperadilan	0	0	0
<b>Jumlah</b>		151	118	33
<b>Persentase penyelesaian sisa</b>			<b>78,15%</b>	

Berikut adalah perkembangan sisa perkara tiga tahun terakhir.

- Perkara Pidana

Perkara	2017	2018	2019
Sisa awal tahun	63	46	46
Perkara Masuk	535	498	471
Beban perkara	598	544	517
Perkara Putus	552	498	463
Sisa Perkara	46	46	54

Jika dalam bentuk grafik akan terlihat sebagai berikut:



*Grafik keadaan sisa perkara selama 3 tahun terakhir*

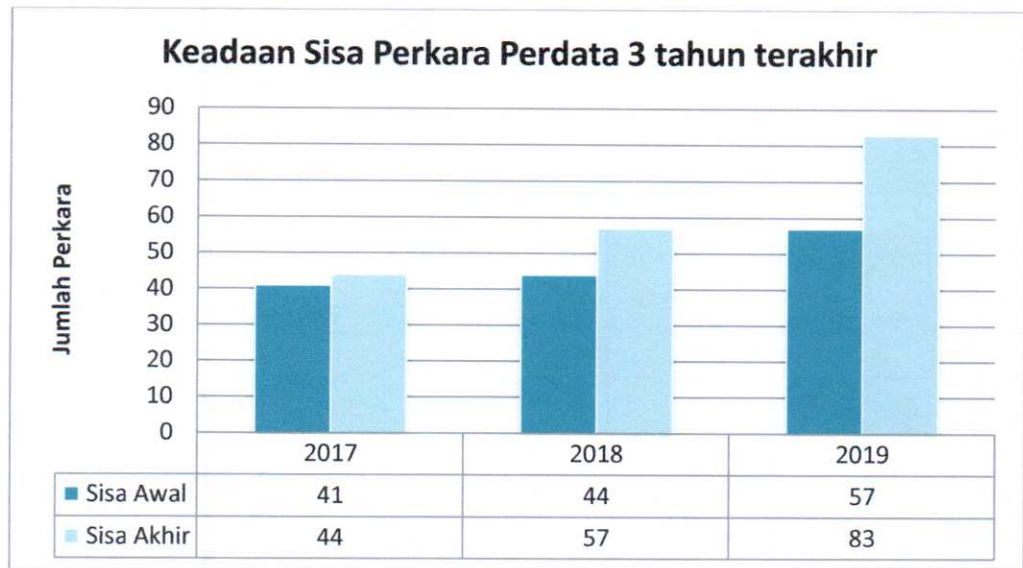
Persentase penyelesaian

Persentase	2017	2018	2019
Persentase sisa perkara terhadap beban perkara	7,7%	8,45%	10,44%
Persentase perkara putus terhadap beban perkara	92,3%	91,5%	89,56%

- Perkara Perdata

Perkara	2017	2018	2019
Sisa awal tahun	41	44	57
Perkara Masuk	261	376	662
Beban perkara	302	420	719
Perkara Putus	258	363	688
Sisa Perkara	44	57	83





Persentase penyelesaian

Persentase	2017	2018	2019
<b>Persentase sisa perkara terhadap beban perkara</b>	14,6%	13,57%	11,54%
<b>Persentase perkara putus terhadap beban perkara</b>	85,4%	86,42%	95,69%

## 2. *Penyelesaian Perkara Tepat Waktu (Dibawah 5 Bulan)*

Yang dimaksud dengan penyelesaian perkara dalam hal ini adalah pengadiministrasian perkara hingga selesai minutasi. Mahkamah agung telah menetapkan lama jangka waktu penyelesaian perkara adalah 5 bulan dari yang sebelumnya 6 bulan. Implementasi penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan di Pengadilan Negeri Bantul berjalan dengan lancar. Jika memang ada perkara yang belum selesai dalam jangka waktu 5 bulan maka akan ada laporan secara berjenjang dengan disertai penyebab atau alasan yang menjadikan perkara tersebut melebihi jangka waktu.

Berikut adalah rekapitulasi data perkara yang melebihi jangka waktu 5 bulan tahun 2019:

- Perkara Perdata (jumlah perkara yang terlambat)

No	Bulan	Jumlah perkara lebih dari 5 bulan
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0

5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
Jumlah		0

- Perkara Pidana (jumlah perkara yang terlambat)

No	Bulan	Jumlah perkara lebih dari 5 bulan
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
Jumlah		0

### 3. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya hukum

Indikator untuk mengetahui tingkat akseptabilitas masyarakat/pencari keadilan terhadap putusan hakim atas suatu perkara salah satunya adalah ada atau tidaknya upaya hukum atas putusan hakim tersebut. Jika tidak ada upaya hukum maka dapat dikatakan bahwa putusan hakim tersebut sudah memuaskan masyarakat/pencari keadilan, dan ini adalah yang diharapkan oleh institusi Mahkamah Agung.

Namun demikian setiap peradilan tidak terlepas dari upaya hukum karena sudah menjadi fasilitas yang berhak untuk digunakan oleh setiap pencari keadilan. Berikut adalah data perkara upaya hukum di Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2019

- Perdata

Upaya Hukum	Beban Perkara 2019	Jumlah					
		Sisa th lalu	Masuk	Beban upaya	Putus	Cabut	Sisa th 2019

				hukum			
Banding		6	21	27	23	0	4
Kasasi		5	17	22	2	0	20
Peninjauan Kembali		2	3	5	0	0	5
Eksekusi		48	15	63	7	13	43
<b>Jumlah</b>	<b>719</b>	<b>75</b>	<b>73</b>	<b>148</b>	<b>61</b>	<b>8</b>	<b>79</b>

Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum secara keseluruhan adalah dengan membandingkan antara jumlah beban upaya hukum dengan jumlah beban perkara pada tahun 2019 diperoleh angka 20,58%. Untuk upaya hukum banding diperoleh angka 3,76 %. Untuk upaya hukum kasasi diperoleh angka 3,06%. Untuk upaya hukum peninjauan kembali 0,69% sedangkan untuk upaya hukum eksekusi 5,98%.

- Pidana

Upaya Hukum	Beban Perkara 2018	Sisa th lalu	Masuk	Jumlah			
				Beban upaya hukum	Putus	Cabut	Sisa th 2019
Banding		4	19	23	16	1	6
Kasasi		3	8	11	2	0	9
Peninjauan Kembali		0	0	0	0	0	0
Grasi		0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>517</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>15</b>

Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum secara keseluruhan adalah dengan membandingkan antara jumlah beban upaya hukum dengan jumlah beban perkara pada tahun 2019 diperoleh angka 6,57%. Untuk upaya hukum banding diperoleh angka 4,45%. Untuk upaya hukum kasasi 2,13%. Sedangkan untuk upaya hukum peninjauan kembali dan grasi masing-masing 0%.

Berdasarkan data diatas maka dapat diperoleh jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu dengan mengurangi beban perkara dengan beban upaya hukum perkara tahun 2019, maka diperoleh data sebagai berikut:

Jenis perkara	Jml putusan tahun 2019	Jml Upaya Hukum			Jml Pkr Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum		
		Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
<b>Perdata</b>	<b>719</b>	27	22	5	<b>692</b>	<b>697</b>	<b>714</b>

<b>Pidana</b>	517	23	11	0	494	506	517
<b>Jumlah</b>	1.236	50	33	5	1.186	1.203	1.231
<b>Persentase</b>					95,95%	97,33%	99,59%

#### 4. Jumlah perkara Perdata yang berhasil di mediasi

Mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara tanpa melalui proses persidangan yang panjang dan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit dianggap sebagai langkah keijakan Mahkamah agng dalam rangka peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, upaya penyelesaian perkara melalui mediasi ini masuk sebagai salah satu indikator kinerja utama pengadilan tingkat pertama.

Akan tetapi di dalam prakteknya upaya ini masih kurang efektif dalam penyelesaian perkara. Berikut adalah data penyelesaian perkara melalui mediasi pada Pengadilan Negeri Bantul

Jumlah perkara perdata yang masuk	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Status			Persentase keberhasilan
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	
195	75	2	66	7	2,66%

Dari data tersebut terdapat 2 perkara dari 75 perkara perdata yang dilakukan mediasi berhasil menjadi akta perdamaian. Jika disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Prosentase keberhasilan mediasi oleh mediator penadiln negeri bantul adalah 2,66 persen. Mediasi sebagai metode penyelesaian perkara yang murah, cepat dan efektif bagi masyarakat belum dapat secara maksimal memberikan efek kepada masyarakat. Diantara faktor yang

mempengaruhi adalah kurangnya kesadaran dari masing-masing pihak juga dari hakim dan atau mediator yang masih menekankan pada persidangan konvensional untuk menyelesaikan perkara.

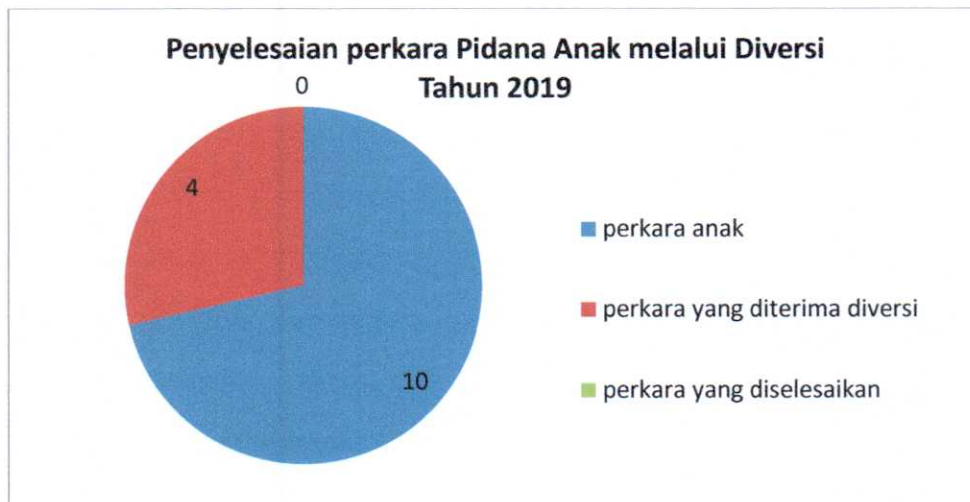
### 5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi juga merupakan salah satu indikator kinerja utama pengadilan tingkat pertama. Artinya penyelesaian perkara melalui diversi dijadikan sebagai salah satu tolok ukur proses penyelesaian perkara yang transparan, pasti dan akuntabel sebagaimana tercantum dalam kinerja utama peradilan.

Berikut adalah data perkara yang diselesaikan melalui diversi di pengadilan negeri bantul tahun 2019:

Jumlah perkara pidana Anak	Jumlah perkara diversi yang diperiksa di pengadilan	Status Diversi			Prosentase penyelesaian Diversi
		Berhasil	Tidak berhasil	Dalam Proses	
10	4	0	4	0	0 %

Penanganan perkara melalui diversi terselesaikan dengan baik. Dari 10 perkara yang diajukan oleh penyidik, terdapat 4 perkara yang diterima memenuhi persyaratan untuk diperiksa oleh pengadilan. Dan tidak ada yang berhasil diselesaikan secara diversi. Penanganan perkara anak melalui diversi ini jika disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut



#### B.4. Rasio Penanganan Perkara

Pada tahun 2019 jumlah perkara masuk baik pidana maupun perdata pada Pengadilan Negeri Bantul adalah 1159 perkara dengan sisa tahun 2018 sejumlah 103 perkara dan perkara

---

yang putus pada tahun 2019 sejumlah 1125 perkara. Maka dari data tersebut bisa diambil prosentase rasio penanganan perkara pada Pengadilan Negeri Bantul adalah  $(1125 / (103+1159)) \times 100\% = 89,14\%$ .

Untuk rasio penanganan perkara yang ditangani majelis (perkara pidana biasa/khusus, anak serta perkara perdata gugatan) atas majelis hakim dengan majelis yang dibentuk sejumlah 3 majelis dengan perincian perkara pidana biasa/khusus, anak dan yang masuk pada tahun 2019 sejumlah 368 perkara, sisa dari tahun 2018 sejumlah 46 perkara dan perkara putus pada tahun 2019 sejumlah 360 perkara. Untuk perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun 2019 sejumlah 114 perkara, sisa dari tahun 2018 sejumlah 45 perkara, dan perkara yang putus pada tahun 2019 sejumlah 103 perkara. Maka dari data dapat diperoleh total sisa perkara tahun 2018 dan perkara masuk pada tahun 2019 untuk perkara pidana biasa/khusus, anak, serta perkara perdata gugatan dan bantahan adalah 941 perkara sedangkan perkara putus pada tahun 2019 untuk perkara-perkara tersebut adalah 823 perkara sehingga didapatkan rasio perkara yang ditangani oleh majelis hakim adalah  $(823/941) \times 100\% = 87,46\%$ .

Sedangkan rasio penanganan perkara yang ditangani oleh hakim tunggal bisa didapat dari perkara pidana singkat, pra-peradilan serta cepat/ringan yang masuk selama 2019 sejumlah 103 perkara serta perkara perdata permohonan dan Gugatan Sederhana yang masuk selama 2019 sejumlah 574 perkara dan sisa dari tahun 2018 sejumlah 12 perkara permohonan dan perkara gugatan sederhana dengan perkara pidana singkat serta cepat/ringan yang putus selama tahun 2019 sejumlah 172 perkara serta perkara perdata permohonan dan gugatan sederhana yang putus selama tahun 2019 sejumlah 559 perkara jadi total sisa perkara tahun 2018 ditambahkan perkara masuk tahun 2019 untuk perkara pidana singkat serta cepat/ringan dan perdata permohonan serta gugatan sederhana adalah 689 perkara dan perkara yang diputus di tahun 2019 sejumlah 662 perkara. didapat rasio penanganan perkara yang ditangani hakim tunggal sejumlah  $(662/689) \times 100\% = 96,08\%$ .

### **C. Akreditasi Penjaminan Mutu**

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa/kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent / ICPE). Upaya penjaminan mutu Pengadilan Negeri Bantul dilakukan dengan memperkuat sistem manajemen mutu yang mengacu pada sistem yang dikembangkan Tim Akreditasi Penjaminan

---

Mutu Badan Peradilan Umum yang terdiri dari beberapa kriteria. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

- Kriteria 1 (Leadership) yaitu meliputi Komitmen Manajemen; Kebijakan Mutu; Wewenang dan Komunikasi; Tinjauan Manajemen
- Kriteria 2 (Strategic Planning), yaitu meliputi Perencanaan sistem manajemen mutu; Realisasi Produk Analisa dan perbaikan
- Kriteria 3 (Customer Focus) yaitu meliputi Proses berkait dengan pelanggan; Komunikasi pelanggan; Produk milik pelanggan
- Kriteria 4 (Document System), yaitu meliputi Persyaratan Dokumen; Pengelolaan Dokumen
- Kriteria 5 (Resource Management), yaitu meliputi Sumberdaya manusia; Sumberdaya Infrastruktur; Sumberdaya lingkungan
- Kriteria 6 (Proses Manajemen), yaitu Pengendalian proses
- Kriteria 7 (Performance Result), yaitu meliputi Pengawasan dan Pengendalian; Analisis data dan Perbaikan.

Dengan sistem penjaminan mutu tersebut kemudian ditetapkan standar penjaminan mutu pelayanan. Dalam ranah implementasi sistem penjaminan mutu ruang lingkupnya meliputi proses pelayanan peradilan yang meliputi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Bantul.

Penjaminan mutu Pengadilan Negeri Bantul telah dilaksanakan penilaian oleh Tim Audit Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada tanggal 11 November 2017. Dengan memperbandingkan antara konsep yang diusung oleh pimpinan Pengadilan Negeri Bantul dengan bukti-bukti implementasi/pelaksanaan kebijakan sampai di tingkat pelaksana, Tim Asesmen Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Umum dan hasil rapat para pimpinan di Mahkamah Agung memberikan predikat "A Exellent" kepada Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul melalui SK Dirjen Badilum Nomor 2041/DJU/OT.01.3/11/2017 tentang PENETAPAN NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERDILAN UMUM. Sebuah pencapaian yang layak untuk tetap dipertahankan untuk menjaga konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B.

---

Tindak lanjut atas pencapaian tersebut adalah dilakukannya Surveilans oleh Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang dilakukan pada mulai tanggal 1 Agustus 2019.

### **1. Pos Bantuan Hukum**

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Bantul terwujud dalam bentuk kerjasama dengan beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Wilayah Provinsi DIY. Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah diadakan MoU (*Memorandum of Understanding*) ini mengirimkan/menempatkan personilnya untuk melakukan piket pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul di ruang yang telah disediakan, dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengadilan atau kesepakatan bersama.

Tugas dari petugas piket ini adalah melayani masyarakat dalam hal pemberian informasi hukum, konsultasi hukum, dan advis hukum serta pemuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian proses berperkara.

Tahun 2019 terdapat 7 (tujuh) lembaga yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Bantul yang membuka layanan dari hari senin hingga kamis. Lembaga-lembaga tersebut adalah:

1. PKBH Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta
2. LKBH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
3. LKBH Pandawa
4. PKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta (UJB)
5. LBH Senopati
6. LBH Sember Nyawa
7. LBH SIKAP

Sebagai komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan layanan masyarakat ini, diwujudkan dengan diberikannya honorarium bagi petugas POSBAKUM yang dibebankan pada DIPA eselon I Badan Peradilan Umum. Pada tahun anggaran 2019, anggaran yang diberikan untuk pemberian layanan POSBAKUM ini sebesar Rp. 31.200.000 (*tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*), dengan volume 312 jam layanan.

Laporan realisasi penyerapan anggaran untuk POSBAKUM pada akhir tahun 2019 adalah 100%, artinya kegiatan posbakum secara anggaran dapat terlaksana dengan sempurna.

Berikut adalah data buku konsultasi di posbakum



No	Bulan	Jumlah konsultasi posbakum
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	2
6	Juni	1
7	Juli	2
8	Agustus	1
9	September	4
10	Oktober	13
11	November	11
12	Desember	5
Jumlah		39

## 2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengadilan demi meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan, Mahkamah Agung menuntut setiap pengadilan meningkatkan akses tersebut dengan adanya sidang keliling maupun Pelayanan Terpadu. Pada Pengadilan Negeri Bantul, kebijakan untuk melakukan sidang keliling dipandang tidak memungkinkan sehingga sidang keliling atau sidang diluar gedung pengadilan menjadi pilihan dalam rangka peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap peradilan.

Data persidangan keliling yang ada di Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan data dari SIPP terdapat **2 (dua)** persidangan yang dilakukan opsi sidang keliling.

## 3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Salah satu bentuk pemberian akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah prodeo, yaitu membebaskan seluruh atau sebagian biaya perkara kepada APBN sehingga masyarakat yang memenuhi syarat tidak perlu mengeluarkan biaya perkara untuk memperoleh layanan di pengadilan.

Layanan prodeo di Pengadilan Negeri Bantul selama tiga tahun terakhir belum dapat menyentuh masyarakat di wilayah hukum pengadilan. Belum ada masyarakat yang mengajukan untuk mendapatkan layanan ini. Masih dilakukan evaluasi kebijakan di

---

Pengadilan Negeri Bantul terhadap prodeo baik dari sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya prodeo maupun terhadap kesadaran masyarakat untuk mendapatkan layanan ini.

Tahun Anggaran 2019 DIPA Pengadilan Negeri Bantul **tidak** memperoleh alokasi anggaran untuk jenis layanan Pembebasan Biaya Perkara ini, sehingga selama tahun 2019 tidak terdapat kegiatan yang berhubungan dengan pembebasan biaya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan ini.

---

### BAB III

#### SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas, integritas, dan kinerja individu yang bekerja didalamnya, apabila integritas dan kinerja individu yang bekerja diorganisasi tersebut tidak berkualitas dan profesional, maka akan menjadi kendala dalam menjalankan suatu sistem yang berorientasi hasil (*result oriented*) dan berbasis pada kinerja. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi dan mempunyai komitmen, semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena suatu sistem yang berbasis kinerja akan menghasilkan output yang memuaskan apabila sistem tersebut dikendalikan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka mensinergikan program pengembangan SDM yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul dengan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan suatu Pengadilan yang Unggul (*Court Excellence*) dan suatu Badan Peradilan Indonesia yang Agung maka Pengadilan Negeri Bantul mencoba menuangkan misi dan agenda perubahan dalam bentuk peningkatan kapasitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Bantul senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan profesionalisme bagi Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional, maupun seluruh staf.

- **Profil Sumber daya Manusia**

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Bantul terdapat 52 (lima puluh dua) orang. Berikut profil sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Bantul :

- a. Hakim

Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul (sesuai data per bulan Desember 2019) berjumlah 10 (sepuluh) orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua). Adapun datanya sesuai dengan Daftar Urut Senioritas adalah sebagai berikut :

1. ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H. (Ketua)
2. KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAP, S.H., M.H. (Wakil Ketua)
3. DEWI KURNIASARI, S.H. (Hakim)
4. SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H. (Hakim)
5. LAILY FITRIA TITIN ANUGERAHAWATI, S.H. (Hakim)

- 
6. KOKO RIYANTO, S.H. (Hakim)
  7. CAHYA IMAWATI, S.H., M.Hum. (Hakim)
  8. RADEN RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, S.H., M.H. (Hakim)
  9. EVI INSIYATI, S.H.,M.H. (Hakim)
  10. AGUS SUPRIYONO, S.H. (Hakim)

b. Kepaniteraan

1) Dalam melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh 3 (tiga) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum dengan susunan sebagai berikut :

1. RUDI SAFARI, S.H., M.H. (Panitera)
2. SUHARNA, S.H., M.H. (Panitera Muda Pidana)
3. VIRONIKA SRI YULIATI, S.Sos, S.H., M.H. (Panitera Muda Perdata)
4. EKA SURYA SETIAWAN, S.H. (Panitera Muda Hukum)

2) Panitera Pengganti

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul berjumlah 14 (empat belas) orang dengan data sebagai berikut :

1. DIYAH PRAMASTUTI, S.H.
2. SRI HARYANI
3. MARKINEM
4. HARINI BUDI TRISNAWATI, S.H.
5. AANG PRABOWO, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Pidana)
6. EDWIN SYAIFUDDIN, S.H.
7. RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Pidana)
8. HAMMAM HARIS, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Perdata)
9. MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Hukum)
10. SUDILAH, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Perdata)
11. ANGGORO SETYAWAN, S.Sos, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Perdata)
12. DIAH PRAVITASIWI, S.H (diperbantukan di Kepaniteraan Hukum)

---

13. RIMBANG KRISDIANTO, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Pidana)

14. NURUSSOBAH, S.H., M.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Perdata)

3) Jurusita

1. AGUS NUR ISRIYADI, S.H.

2. SURADAL (diperbantukan di Kepaniteraan Perdata)

3. PRASETYA SUJADI, S.H. (diperbantukan di Kepaniteraan Hukum)

4. CAHYA MULYANTO, A.Md (diperbantukan di Kepaniteraan Pidana)

4) Jurusita Pengganti

1. FATIM SA'ADAH, Bsc. (merangkap staf Kepaniteraan Pidana)

2. SUYATINI (merangkap staf Kepaniteraan Pidana)

3. MARDIYA H (merangkap staf Kepaniteraan Hukum)

5) Staf Kepaniteraan Pidana

1. MUJIANA

2. ANDY SETIAWAN, S.H.

6) Staf Kepaniteraan Perdata

1. IKA HEPSYAWATI, S.E. (Kasir)

2. SATRIA PINANDITA, S.E.

3. ANA RATNAWATI

4. UTTUNGA SAHISNU, S.H.

7) Staf Kepaniteraan Hukum

1. ISTIKA ARDININGSIH, S.H. (Calon Panitera Pengganti)

c. Kesekretariatan

- Dalam upaya mendukung tugas-tugas Kesekretariatan, sekretaris dibantu oleh tiga (3) Kepala Sub Bagian yang terbagi atas Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan. Adapun Susunannya adalah sebagai Berikut :

1. YUYUN FITHRIYAH, S.E. Ak. (Sekretaris)

2. NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H. (Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana)

3. JOHAN WAHYUDI, S.E. (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan)

4. WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P. (Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan)

- Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan

Untuk membantu tugas-tugas di Sub Bagian Umum Dan Keuangan ditugaskan staf-staf berjumlah 6 (enam) orang dengan data sebagai berikut

1. YDD NANDA DEBY RETNANDI, A.Md.
2. SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md.
3. MOHAMMAD JAZURI
4. SITI SOLIKHAH, S.H.

- Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dibantu oleh 1 (satu) orang staf sebagai berikut :

1. ASIANI ALKOBI, S.E.

- Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Adapun tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan dilaksanakan oleh 1 (satu) orang staf sebagai berikut :

1. HENDRA ANDREA, A.Md.

- Rekrutmen (Kebutuhan Sumber Daya Manusia)

Untuk melihat kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Bantul, kami mencoba membuat data statistik keadaan SDM pada Pengadilan Negeri Bantul sebagai Berikut :

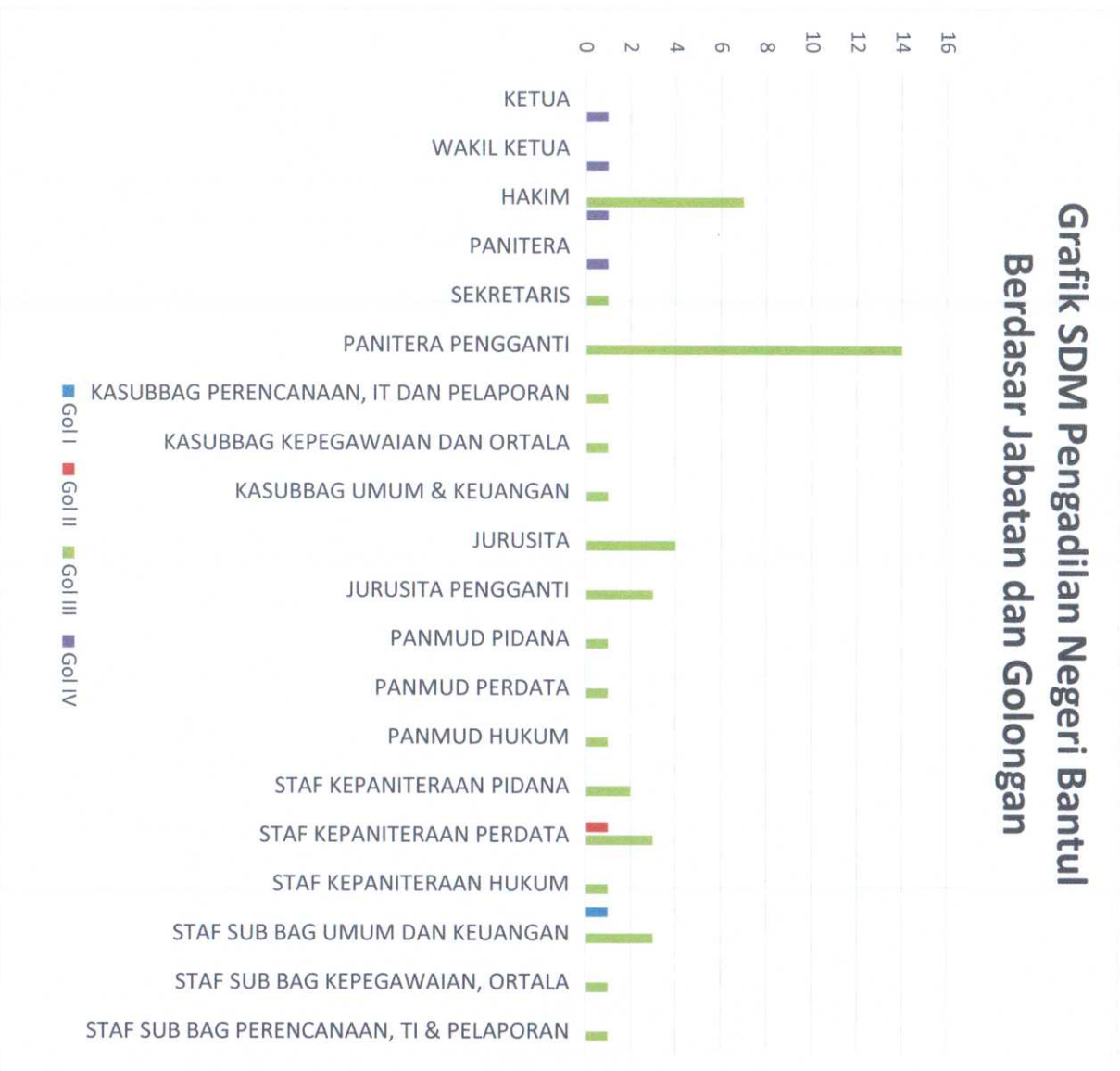
a. Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Gol. I		Gol. II		Gol. III		Gol. IV		Keterangan
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	KETUA	-	-	-	-	-	-	1	-	1 Orang
2	WAKIL KETUA	-	-	-	-	-	-	1	-	1 Orang
3	HAKIM	-	-	-	-	3	4	-	1	8 Orang
4	PANITERA	-	-	-	-	-	-	1	-	1 Orang
5	SEKRETARIS	-	-	-	-	1	-	-	-	1 Orang
6	PANITERA PENGGANTI	-	-	-	-	7	7	-	-	14 Orang
7	KASUBBAG PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN	-	-	-	-	1	-	-	-	1 Orang
8	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	-	-	-	-	-	1	-	-	1 Orang

No	Jabatan	Gol. I		Gol. II		Gol. III		Gol. IV		Keterangan
		L	P	L	P	L	P	L	P	
9	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	-	-	-	-	1	-	-	-	1 Orang
10	JURUSITA	-	-	-	-	4	-	-	-	4 Orang
11	JURUSITA PENGGANTI	-	-	-	-	-	3	-	-	3 Orang
12	PANMUD PIDANA	-	-	-	-	1	-	-	-	1 Orang
13	PANMUD PERDATA	-	-	-	-	-	-	1	-	1 Orang
14	PANMUD HUKUM	-	-	-	-	1	-	-	-	1 Orang
15	STAF KEPANITERAAN PIDANA	-	-	-	-	2	-	-	-	2 Orang
16	STAF KEPANITERAAN PERDATA	-	-	-	1	2	1	-	-	4 Orang
17	STAF KEPANITERAAN HUKUM	-	-	-	-	-	1	-	-	1 Orang
18	STAF SUB BAG UMUM DAN KEUANGAN	1	-	-	-	1	2	-	-	4 Orang
19	STAF SUB BAG KEPEGAWAIAN, ORTALA	-	-	-	-	-	1	-	-	1 Orang
20	STAF SUB BAG PERENCANAAN, IT & PELAPORAN	-	-	-	-	1	-	-	-	1 Orang
Total		1	-	-	1	25	20	4	1	52 Orang

*Tabel statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasar Jabatan*

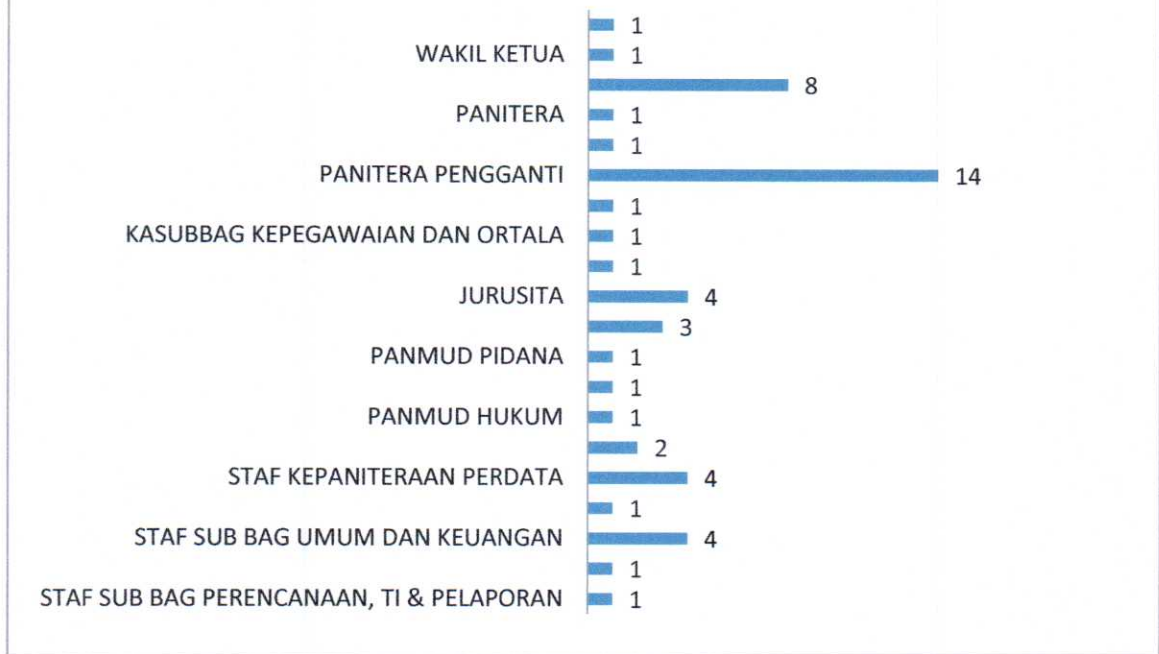
## Grafik SDM Pengadilan Negeri Bantul Berdasar Jabatan dan Golongan



*Grafik Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan Jabatan dan Golongan*



## Grafik SDM Pengadilan Negeri Bantul Berdasar Jabatan



*Grafik Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan Jabatan*

### b. Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasar Pendidikan

No	Pendidikan	Gol. I		Gol. II		Gol. III		Gol. IV		Keterangan
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	S2	-	-	-	-	1	6	3	-	10 Orang
2	S1	-	-	-	1	12	17	-	-	30 Orang
3	D3	-	-	-	-	3	2	-	-	5 Orang
4	SMA	-	-	-	-	2	4	-	-	6 Orang
5	SMP	1	-	-	-	-	-	-	-	1 Orang
6	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	- Orang
Total		1	-	-	1	18	29	3	-	52 Orang

*Tabel statistik pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasar pendidikan*

### c. Statistik Pegawai berdasar Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Keterangan
1	IV/c	1	-	1 Orang
2	IV/b	1	0	1 Orang
2	IV/a	1	2	3 Orang
3	III/d	6	6	12 Orang
4	III/c	9	8	17 Orang
5	III/b	4	5	9 Orang
6	III/a	5	2	7 Orang

7	II/d	-	1	1 Orang
8	II/c	-	-	0 Orang
9	I/d	1	-	1 Orang
Total		28	24	52 Orang

*Tabel statistik pegawai Pengadilan Negeri Bantul berdasar Golongan/Ruang*

Pengadilan Negeri Bantul merupakan Pengadilan Negeri dengan tipe klas I dimana jumlah beban perkara pada tahun 2019 berjumlah 517 Perkara Pidana dan 719 Perkara Perdata sehingga total perkara adalah 1.236 perkara.

Dengan jumlah hakim yang bersidang adalah 8 orang hakim maka rata-rata perkara yang ditangani masing masing hakim adalah sejumlah 155 perkara per hakim dalam satu tahun atau 13 perkara per bulan. Jumlah ini adlah angka yang masih kurang apabila dibandingkan pengadilan yang setara di daerah yang lain.

Untuk tenaga teknis yang ada sejumlah 25 orang. Demikian juga dengan jumlah tenaga teknis yang ada tidak sama dengan perbandingan antara jumlah perkara dengan jumlah enaga teknis di pengadilan lain yang setara. Walaupun memang Pengadilan Negeri Bantul dapat menyelesaikan hampir 90% perkara yang ditangani.

Walaupun demikian, untuk staf administrasi dirasa masih sangat kurang apabila melihat data maupun grafik sumber daya manusia. Mengingat tak kalah pentingnya peran staf administrasi dalam proses penyelesaian tugas-tugas kepaniteraan dan penyelesaian tugas-tugas kesekretariatan serta mengingat bahwa tak sedikit pula Panitera Pengganti yang pada prinsipnya merupakan jabatan definitif masih merangkap tugas di kepaniteraan, maka Pengadilan Negeri Bantul sangat membutuhkan banyak tenaga Sumber Daya Manusia.

### 1. Mutasi

Mutasi Hakim dan Pegawai masuk maupun keluar yang terjadi pada Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

#### a. Hakim

- Mutasi Masuk Hakim

No.	Nama	Asal	Tanggal	Jabatan
1.	ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.	PN Lubuk Linggau	29 Mei 2019	Ketua
2.	KHOIRUMAN PANDU KESUMA HARAHAP, S.H., M.H.	PN Yogyakarta	19 Juni 2019	Wakil Ketua

*Tabel mutasi Hakim masuk ke Pengadilan Negeri Bantul*

- Mutasi Keluar Hakim

No.	Nama	Tujuan	Tanggal	Jabatan
1.	AGUNG SULISTIYONO, S.Sos., S.H., M. Hum	PN Samarinda	30 Mei 2019	Wakil Ketua
2.	SUBAGYO, S.H., M.Hum.	PN Tarakan	20 Juni 2019	Ketua

*Tabel mutasi Hakim keluar dari Pengadilan Negeri Bantul*

b. Panitera dan Staf

- Mutasi Masuk Panitera dan Staf

No.	Nama	Asal	Tanggal	Jabatan
1.	RUDI SAFARI, S.H.,M.H	PN KUNINGAN	15 Maret 2019	Panitera
2.	MARKINEM	PN SORONG	15 April 2019	Panitera Pengganti
3.	VIRONIKA SRI YULIATI, S.Sos.S.H.,M.H	PN SLEMAN	1 Maret 2019	Panmud Perdata
4.	NURUSSOBAB, S.H.,M.H	PT DKI JAKARTA	6 September 2019	Panitera Pengganti
5.	PRASETYA SUJADI, S.H	PN YOGYAKARTA	6 September 2019	Jurusita
6.	CAHYA MULYANTO, A.Md	PN JAKARTA TIMUR	6 September 2019	Jurusita
7.	DIAH PRAVITASIWI, S.H	PN WONOGIRI	27 Agustus 2019	Panitera Penanti
8.	YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak	PT Yogyakarta	22 November 2019	Sekretaris
9.	ASIANI LAKOBI, S.E	PT SAMARINDA	22 Juli 2019	Staf
10.	ANDY SETIAWAN	-	1 April 2019	CPNS
11.	UTTUNGA SAHISNU, S.H	-	1 April 2019	CPNS

*Tabel mutasi Panitera dan Staf masuk ke Pengadilan Negeri Bantul*

- Mutasi Keluar Panitera dan Staf

No.	Nama	Tujuan	Tanggal	Jabatan
1.	SIGIT INDRIYATNO, S.H.,M.H	PN KOTABARU	22 Februari 2019	Panitera
2.	NOVI MAULIDYAWATI, S.H	PN KLATEN	1 Maret 2019	Panitera Pengganti
3.	RULLIANA YUDHAWATI, S.H	PN YOGYAKARTA	1 Maret 2019	Panitera Pengganti
4.	YULINA NGESTI HANDAYANI, S.H.,M.H	PN SLEMAN	1 Maret 2019	Panitera Pengganti
5.	LESTIJONO WARSITO, S.H.,M.H	PN SLEMAN	8 Maret 2019	Panitera
6.	MUCHTOLIP, S.H	PN TENGGARONG	16 Agustus 2019	Panitera Muda Pidana
7.	YUDHA AYU TIMORNIYATI, S.H	PN YOGYAKARTA	27 Agustus 2019	Panitera Pengganti

No.	Nama	Tujuan	Tanggal	Jabatan
8.	DARU BUANA SEJATI, S.H	PN SLEMAN	27 Agustus 2019	Panitera Pengganti
9.	DEWI INDRIYANI, S.H	PN YOGYAKARTA	23 September 2019	Panitera Pengganti
10.	WIRATNO, S.H	PN WATES	21 November 2019	Sekretaris
11.	SEPTIAN ADI SATRIA, S.H	PN WATES	22 Agustus 2019	Panitera Pengganti
12.	LAILA KIRFAH, S.H	PN WONOSARI	22 Agustus 2019	Panitera Pengganti

*Tabel mutasi Panitera dan Staf keluar dari Pengadilan Negeri Bantul*

#### A.4. Promosi

Selama tahun 2019 seluruh posisi jabatan di Pengadilan Negeri Bantul sudah terisi sehingga tidak ada kekosongan jabatan. Berkaitan dengan promosi hakim, terdapat satu hakim yang promosi jabatan yaitu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul mendapatkan promosi jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tarakan. Sedangkan untuk usulan promosi jabatan di lakukan dengan mengidentifikasi pegawai/pejabat struktural yang sudah mencukupi secara kepangkatan dan masa kerja untuk diusulkan promosinya. Berikut adalah data promosi yang ada di Pengadilan Negeri antul Tahun 2019:

No.	Nama	Jabatan	Promosi	Nomor Surat Keputusan / tanggal SK
1.	Subagyo, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas I B	2088/DJU/SK/KP.04.5/12/2018 tanggal 3 Desember 2018
	Agung Sulistiyono, S.H.,S.Sos.,M.Hum	Ketua Pengadilan Negeri Bantul kelas I B	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Kelas I A	1155/DJU/SK/KP.04.5/4/2019 Tanggal 2 April 2019
	Lestijono Warsito, S.H.,M.H	Panitera Pengadilan Negeri Bantul kelas I B	Panitera Pengadilan Negeri Sleman kelas I A	25/DJU/SK/KP.04.5/1/2019 Tanggal 24 Januari 2019
	Sigit Indriyatno, S.H.,M.H	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru	24/DJU/SK/KP.04.5/1/2019 Tanggal 24 Januari 2019
	Muchtolip, S.H	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tenggarong	2492/DJU/SK/KP.04.5/7/2019 Tanggal 9 Juli 2019
	Wiratno, S.H	Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul kelas I B	Sekretaris Pengadilan Negeri Wates Kelas I B	839/SEK/Kp.I/SK/X/2019 Tanggal 14 Oktober 2019
	Septian Adi Satria, S.H	Staf Pengadilan Negeri Bantul kelas I B	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wates Kelas I B	2502/DJU/SK/KP.04.5/7/2019 Tanggal 23 Juli 2019
	Laila Kirfah, S.H	Staf Pengadilan Negeri Bantul kelas I B	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari Kelas II	2502/DJU/SK/KP.04.5/7/2019 Tanggal 23 Juli 2019

*Tabel data Promosi Jabatan Pegawai*

### A.5. Pensiun

Adapun Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Bantul yang memasuki masa pensiun pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Masa Kerja	Jabatan	Usia	Tanggal pensiun
1.	SRI SUDARSIH	21 th 8 bl	Stak Umum dan Keuangan	56 tahun	1 Desember 2019

*Tabel data Pegawai Negeri Sipil yang pensiun*

### A.6. Diklat

Diklat teknis mupun non-teknis yang diikuti oleh pimpinan dan pegawai Pengadilan Negeri Bantul tahun 2019 sebagai berikut

No.	Nama Diklat	Tanggal	Jumlah
1.	Diklat sertifikasi system peradilan anak (SPPA)	7 s.d 17 April 2019	1 orang
2	Diklat Training of Mentor I Program PPC terpadu Lingkungan Peradilan Umum	21 s.d 24 Juli 2019	3 orang
3	Diklat pra Jabatan gol III (Latsar)	6 Agustus s.d 14 Oktober 2019	2 orang
4	Diklat sertifikasi system peradilan anak (SPPA)	16 s.d 31 Oktober 2019	1 orang

**BAB III**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA, DAN TEKNOLOGI**  
**INFORMASI**

**A. PENGELOLAAN KEUANGAN**

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran pelaksanaan dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan serta sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan tahun anggaran berikutnya.

Anggaran tertuang dalam DIPA dan RKA-KL / POK (petungjuk Operasional Kegiatan). Ada 2 (dua) DIPA/POK pada satan kerja Pengadilan Negeri Bantul,yaitu DIPA 005.01 untuk eselon 1 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 005.03 ntuk eselon 1 Badan Peradilan Umum. Tahun Anggaran 2019 alokasi untk masing-masing DIPA adalah:

- DIPA 005.01 (Badan Urusan Adminisrasi) sebesar Rp. 6.736.275.000 (*enam milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)
- DIPA 005.03 (Badan Peradilan Umum) sebesar Rp. 127.440.000 (*seratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*)

Pelaksanaan DIPA tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. **DIPA 005.01 (*Badan Urusan Administrasi*)** yaitu sebesar Rp. 6.736.275.000 (*enam milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) terperinci untuk mencapai output program kegiatan yang telah ditentukan.

Rincian DIPA berdasarkan kelompok belanja :

No	Kelompok belanja	Jumlah
1	Belanja pegawai (belanja 51)	Rp. 5.711.262.000
2	Belanja Barang (52)	Rp. 1.025.013.000
3	Belanja Modal (53)	Rp. 87.500.000

Rincian DIPA berdasarkan program/kegiatan:

No	Program/Kegiatan/output	Jumlah
➤	005.01.01 [Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung]	
➤	1066 [Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan urusan Administrasi]	

➤ Layanan Perkantoran	
A. Gaji dan Tunjangan	Rp. 5.711.262.000
B. Operasional dan pemeliharaan kantor	RP. 1.018.113.000
➤ 005.01.02 [Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung]	
➤ 1071 [Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung]	
➤ Layanan internal pengadaan sarana dan prasarana	Rp. 87.500.000

Dalam perjalanannya, DIPA 005.01 mengalami beberapa kali revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan DIPA. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 01:

No	Jenis revisi	Tanggal pengesahan	Keterangan
I	Revisi POK; Rencana Penarikan dana (Hal. III DIPA); dan Perubahan Pejabat perbendaharaan	01 april 2019	Tidak mengubah Digital Stamp
II	Revisi penembahan belanja operasional perkantoran (langganan internet) dan tambahan belanja modal	29 Mei 2019	BA.BUN
III	Revisi POK dan Rencana Penarikan dana (Hal. III DIPA)	27 September 2019	Tidak Mengubah Digital Stamp
IV	Revisi POK, Rencana Penarikan Dana, dan Perubahan Pejabat Perbendaharaan	29 November 2019	Tidak Mengubah Digital Stamp

Dari revisi tersebut hanya berupa revisi POK yang merupakan kewenangan KPA sehingga tidak mengubah Digital Stamp pada DIPA sehingga bisa dikatakan hanya revisi biasa karena tidak mengubah output maupun volume komponen dalam DIPA. Pergeseran hanya terjadi antar akun di dalam komponen yang sama.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2019 untuk DIPA 005.01 Pengadilan Negeri Bantul adalah sebesar 98,07% dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2018				TAHUN 2019				
		PAGU DIPA		REALISASI		PAGU DIPA		REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp	
	B. Pegawai	5.097.792.000	5.743.191.352	112,66%	(645.400.423)	5.711.262.000	5.606.685.231	98,17	104.576.769	
	B. Barang Opr	899.877.000	860.896.711	95,67%	38.980.289	1.018.113.000	997.583.237	97,98	20.529.763	

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019				
		PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp
	B. Barang Non Opr	38.736.000	23.836.320	61,54%	14.899.680	6.900.000	1.050.000	15,22	5.850.000
	B. Modal	177.000.000	173.742.270	98,16%	3.257.730	87.500.000	86.800.000	99,20	700.000
	<b>Jumlah 01</b>	<b>6.213.405.000</b>	<b>6.801.666.653</b>	<b>109,47%</b>	<b>(588.261.653)</b>	<b>6.823.775.000</b>	<b>6.692.118.468</b>	<b>98,07</b>	<b>131.656.532</b>

*Tabel perbandingan realisasi anggaran TA 2018 dan TA 2019*

Berdasarkan tabel diatas realisasi anggaran Tahun 2019 belanja gaji terserap normal 98%. Sedangkan untuk belanja barang operasional sejumlah 97% .

Belanja barang non operasional jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan realisasi sekitar 46,32 persen. Program ini berisi akun-akun perjalanan dinas untuk koordinasi/konsultasi/sosialisasi. Hal ini disebabkan hanya sedikit perjalanan untuk kegiatan dimaksud.

Untuk operasional dan pemeliharaan perkantoran mengalami kenaikan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi belanja pengadaan sarana dan prasarana bisa dikatakan normal yaitu 99,20 persen. Yaitu pengadaan sarana pendukung SIPP berupa laptop yang spesifikasinya telah ditentukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan laptop dengan spesifikasi dimaksud berada pada harga dibawah pagu DIPA, sehingga terdapat selisih pasar yang wajar antara pagu dengan realisasi. Namun demikian output pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP tersebut telah terpenuhi 100 persen.

2. **DIPA 005.03** (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 127.440.000 (*seratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*).

Uraian DIPA berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut:

No	Kelompok belanja	Jumlah
1	Belanja pegawai (belanja 51)	Rp. 0
2	Belanja Barang (52)	Rp. 127.440.000
3	Belanja Modal (53)	Rp. 0

Rincian DIPA berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan :



No	Program/Kegiatan/output	Jumlah
	005.03.07 [Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum] ➤ 1049 [Peningkatan Manajemen Peradilan Umum]	
1	Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) [1049.003]	Rp. 31.200.000
2	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu [1049.005]	Rp. 96.240.000

Sebagaimana DIPA 005.01, DIPA 005.03 juga mengalami beberapa kali revisi. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 03:

No	Jenis revisi	Tanggal pengesahan	Keterangan
I	Revisi Rencana Penarikan dana (Hal. III DIPA) dan Perubahan pejabat Perbendaharaan	01 April 2019	Tidak mengubah Digital Stamp
II	Revisi POK dan Rencana Penarikan dana (Hal. III DIPA)	02 Oktober 2019	Tidak Mengubah Digital Stamp
III	Rencana Penarikan dana (Hal. III DIPA) dan Perubahan Pejabat Perbendaharaan	29 November 2019	Tidak Mengubah Digital Stamp

Dari semua revisi tersebut tidak ada yang mengubah Digital Stamp DIPA 03 Pengadilan Negeri Bantul, karena revisi hanya terjadi pada rincian Petunjuk Operasional Kegiatan dan perubahan pada rencana penarikan pada halaman III DIPA.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2019 untuk DIPA 005.03 Pengadilan Negeri Bantul adalah sebesar 99,00% dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			SISA DANA	
		PAGU DIPA	REALISASI		PAGU DIPA	REALISASI			
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	%		
<b>PENGADILAN NEGERI BANTUL</b>									
	B. Barang (03)	139.640.000	138.724.100	99,34	915.900	127.440.000	126.168.330	99,00	1.271.670
	<b>Jumlah 03</b>	<b>139.640.000</b>	<b>138.724.100</b>	<b>99,34</b>	<b>915.900</b>	<b>127.440.000</b>	<b>126.168.330</b>	<b>99,00</b>	<b>1.271.670</b>

*Tabel perbandingan realisasi anggaran 03 TA 2017 dan TA 2019*

Jika diperbandingkan antara realisasi tahun 2018 dengan tahun 2019 ada kenakan prosentase realisasi anggaran. Namun terdapat perbedaan dalam hal output, dimana pada tahun anggaran 2018 terdapat output Perkara peradilan Umum yang diselesaikan dengan pembebasan biaya perkara. Hal ini karena pada tahun 2019 satuan kerja pengadilan negeri bantul tidak mendapatkan alokasi DIPA untuk kegiatan/output tersebut.

Mekanisme revisi POK yang dilakukan tahun ini menjadi salah satu faktor terjadinya penurunan 0,34 persen realisasi dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa detail dari akun yang kurang terserap akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan DIPA tahun 2019.

## B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

### B.1. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik Negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor permanen, dan rumah negara permanen. Pengadilan Negeri Bantul memiliki 2 (dua) gedung kantor yang berdiri di satu sertifikat tanah dan 8 (delapan) bangunan rumah dinas untuk digunakan sendiri sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri, Hakim dan Panitera.

Tanah pada Pengadilan Negeri Bantul telah bersertifikat a.n. Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI sejak maret 2011. Berikut adalah data tanah Pengadilan Negeri Bantul:

NO	URAIAN	LOKASI	SERTIFIKAT		LUAS (M2)
			NOMOR	TANGGAL	
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.18/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	295
2.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.17/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	305
3.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.16/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	324

NO	URAIAN	LOKASI	SERTIFIKAT		LUAS (M2)
			NOMOR	TANGGAL	
4.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.36/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011	358
5.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.19/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	13/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	391
6.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.20/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	15/05/1988; ralat tgl 03/03/2011	399
7.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bejen Baru, Bantul	SHP No.37/Bantul a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011	434
8.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.04 Bantul	SHP No.06/ Ringinharjo a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011	630
9.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.04 Bantul	SHP No.07/ Ringinharjo a.n. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	09/03/1993; ralat tgl 03/03/2011	2.759
<b>JUMLAH</b>					<b>5.895</b>

Berikut adalah data bangunan dan pemanfaatan Pengadilan Negeri Bantul:

	NAMA BARANG	LUAS	NUP	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI	PEMANFAATAN
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.804	1	1978	baik	Digunakan sendiri (Kantor)
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	480	2	2004	baik	Digunakan sendiri (Kantor)
3	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	120	1	1978	baik	Digunakan sendiri (Rumah dinas Ketua)
4	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	105	1	1979	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
5	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	82	2	1980	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
6	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	3	1981	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)

	NAMA BARANG	LUAS	NUP	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI	PEMANFAATAN
7	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	4	1982	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
8	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	5	1982	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
9	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	6	1982	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
10	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	7	1981	baik	Digunakan sendiri (Rumah Dinas)
	<b>Jumlah</b>	<b>2.941</b>	<b>10</b>			

Jenis-jenis pengelolaan tanah dan bangunan diantaranya adalah pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan. Berikut adalah data pengelolaan tanah dan bangunan tahun 2019:

No	Jenis pengelolaan	Uraian/jenis barang	Jumlah	Keterangan
1	Pengadaan	-	-	
3	Pemanfaatan/Sewa	Sewa rumah dinas	8	Hakim dan panitera
4	Penghapusan	-	-	
5	Penilaian	-	1	Revaluasi Ulang
6	Pemindahtanganan	-	-	

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dilakukan adalah :

1. Pembenahan ruang tunggu pengunjung sidang
2. Partisi pembatasan akses pengunjung
3. Smoking area
4. Pembenahan saluran air
5. Pembenahan ruang laktasi/kesehatan
6. Pembenahan ruang mediasi/kaukus/
7. Perbaikan pagar
8. Pembenahan jaringan listrik
9. Perbaikan pembatas pagar ruang sidang

## B.2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Peralatan dan mesin

Sarana dan prasarana fasilitas peralatan dan mesin meliputi pengelolaan aset Barang Milik Negara yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris/perabot kantor.

Selama tahun 2019 terdapat penambahan sarana dan prasarana fasilitas peralatan dan mesin, yaitu berupa:

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Laptop	7	Unit	Pembelian
2.	P.C. Unit	4	Unit	Transfer masuk
3.	Komputer server	1	Unit	Transfer masuk
4.	P.C. UPS	4	Unit	Transfer masuk
5.	Komputer jaringan lainnya (Kios K)	1	Unit	Transfer masuk
6.	Rak Server	1	Unit	Transfer masuk

*Tabel penambahan sarana dan prasarana TA 2019*

Pengelolaan sarana peralatan dan mesin pada Pengadilan Negeri Bantul berupa perawatan rutin kendaraan-kendaraan bermotor dan servis pada kendaraan yang mengalami kerusakan. Hal yang sama juga dilakukan untuk inventaris dan perabotan yang lain.

Pemeliharaan sarana dan peralatan dan mesin dilakukan terhadap peralatan berikut:

No	Nama peralatan	Jumlah	Keterangan
1.	P.C. Unit	31	Service; Hardisk; PSU; VGA; dll
2.	Laptop/Notebook	19	Service; Baterai; Monitor; Keyboard;
3.	Printer	23	Service; Cartridge; tinta; Reset; Toner; dll
4.	Mesin Faxcimile	1	Service
5.	Soundsystem	2	Service
6.	LCD Projector	1	-
7.	Kendaraan Roda 4	4	Service
8.	Kendaraan Roda 2	12	Sercive ringan / berat
9.	Air Conditioner (A.C. Split)	22	Service ringan dan berat
10.	Peralatan CCTV	1	Kamera; Power Adapter

11.	PABX	1	Service
12.	Jaringan		Listrik, intranet, telepon,

Tabel pemeliharaan peralatan dan mesin

### C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dari sedemikian banyaknya agenda yang dicanangkan oleh Peradilan Umum dalam melaksanakan Reformasi, Teknologi Informasi merupakan salah satu bidang yang sangat urgent dan paling disoroti. Secara umum, Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri Bantul sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dalam penegakan hukum telah memberikan kemudahan bagi masyarakat umum untuk memperoleh informasi secara terbuka (mulai dari proses beracara sampai dengan pemberitahuan isi putusan). Selain itu, bagi internal Peradilan Umum pun telah dipermudah dalam mengakses informasi-informasi yang *up to date* baik dari Pengadilan Tingkat Banding atau dari Dirjen Badilum maupun Mahkamah Agung RI. Dengan adanya dukungan Teknologi Informasi tersebut secara khusus dapat membantu penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

#### C.1. Implementasi E-Court

- Aplikasi SIPP

Sejak penambahan menu *E-court* pada versi 3.2.0-5, SIPP Pengadilan Negeri Bantul sudah menerima perkara e-court hingga saat ini, yaitu SIPP versi 3.3.0-1.

Data implementasi e-court:

Jumlah perkara perdata yang masuk	Jumlah perkara yang masuk melalui e-court	Putus	Sisa	Persentase perkara yang didaftarkan melalui e-court
195	52	13	39	26,66%

- Perangkat penunjang Teknologi Informasi

Perangkat penunjang teknologi Informasi yang telah dimiliki oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

No.	Harware / Software	Jumlah/uraian	Keterangan / Kondisi
1.	Server	3 Unit	Baik
2.	Koneksi Internet	Dedicated 50 Mbps	Baik
3.	Komputer PC	3 Unit	Baik
4.	KiosK	1 unit	Baik
5.	SIPP	Versi 3.3.0-1	
7.	Web Hosting	20 Gb	
8.	Titik wifi/access point	6 titik	Baik
9.			

- Pojok E-Court

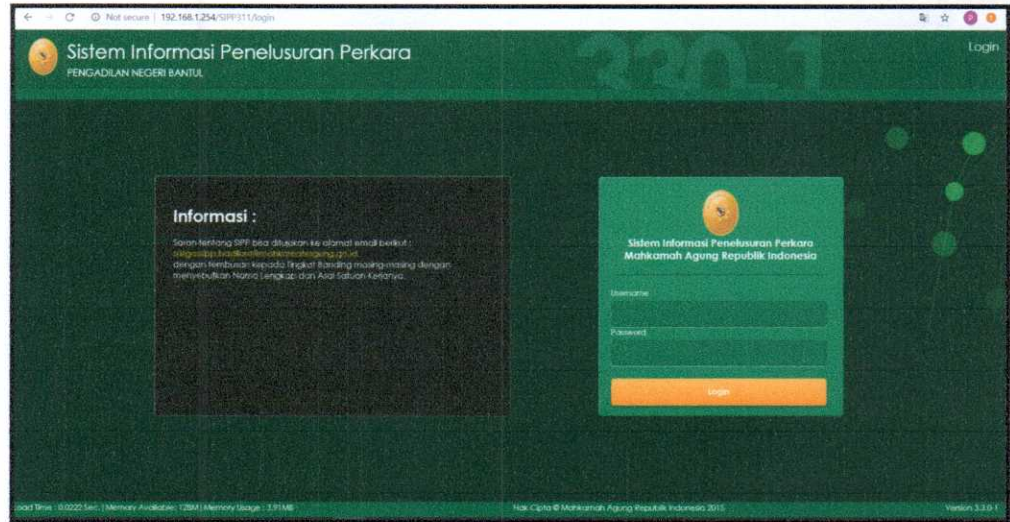
Pengadilan Negeri Bantul belum mempunyai pojok ecourt yang memadai. Hal ini disebabkan selain karena kurangnya ketersediaan ruang publik, pembuatan pojok e-court berkaitan dengan juga berkaitan dengan dukungan dana. Oleh karena itu, pojok e-court masih sangat sederhana. Meskipun demikian atensi pengguna e-court di Pengadilan Negeri Bantul berjalan bagus terbukti dengan 26,66% perkara perdata dilakukan pendaftaran perkara secara e-court.



## C.2. Implementasi SIPP

- Aplikasi SIPP

Hingga saat ini aplikasi SIPP telah menjadi bagian penting bahkan utama dari proses penanganan perkara di Pengadilan Negeri Bantul. Hingga 31 Desember 2019 aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Bantul sudah menggunakan versi terbaru yaitu versi 3.3.0-1.



*Gambar Aplikasi SIPP PN Bantul*

- Perangkat penunjang Teknologi Informasi

Perangkat penunjang teknologi Informasi yang telah dimiliki oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut :

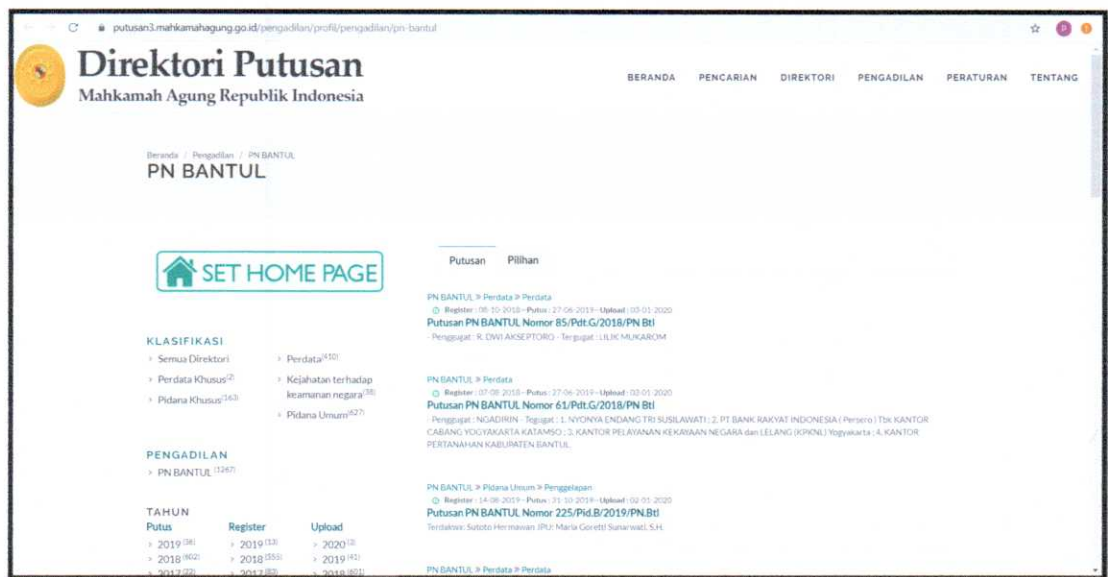
No.	Harware / Software	Jumlah/uraian	Keterangan / Kondisi
1.	Server	2 (server aplikasi dan server data)	Baik
2.	Mikrotik Router	2 Unit	Baik
3.	Modem Internet	1 Unit	Baik
4.	Switch	1 Unit	Baik
5.	Hub	1 Unit	Baik
7.	Koneksi Internet	Dedicated 50 Mbps	Baik
8.	Komputer PC	35 Unit	Baik
9.	Laptop	26 Unit	Baik
10.	Titik wifi access point	6 titik	
12			

One Day Publish diartikan sebagai publikasi amar putusan suatu perkara yang telah diputus dalam jangka waktu 1x24 jam ke masyarakat/ pencari keadilan ke situs resmi.



Satu perwujudan one day publish ini adalah adanya direktori putusan mahkamah agung RI yang dapat di akses di situs [www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id). Situs ini adalah wadah bagi setiap putusan di pengadilan di seluruh indonesia untuk dapat diakses oleh masyarakat/pencari keadilan.

Terkait hal tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah mentautkan direktori putusan Pengadilan Negeri Bantul di website [www.pn-bantul.go.id](http://www.pn-bantul.go.id) pada kolom informasi cepat tab Direktori Putusan Mahkamah Agung. Berikut adalah tampilan direktori putusan Pengadilan Negeri Bantul:



*Gambar Direktori Putusan PN Bantul*

Proses upload putusan ke direktori putusan dilakukan oleh petugas dalam jangka waktu 1x24 jam sejak suatu perkara diputus ke situs tersebut.

Terkait dengan SIPP, telah keluar versi yang berkaitan dengan *one day publish* dimana telah ada menu khusus di aplikasi SIPP yang dapat melakukan upload ke direktor putusan. Dengan adanya fitur ini memudahkan petugas untuk melakukan upload data dalam rangka *one day publish* dengan mudah dan tepat.

192.168.1.254/SIPP/1/antrian\_dirput

one day belum menerima agung abaan - uoogte search

## Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Selamat Datang **Agung** **Pada** **Antrean**  
 Anda Login Sebagai **Agung** **Pada** **Antrean**  
 [Logout] [Kembali] [Help]

Home | Pendaftaran Umum | Pendaftaran Khusus | Pidana Umum | Pidana Khusus | Delegasi | Laporan | Jadwal Sidang | Antr Perkar | Antrean | e-Court | Fisica | Amlerensi | System

### LAPORAN UPLOAD

Dokumen Elektronik (e-Docs) Direktori Putusan Mahkamah Agung

#### ANTRIAN E-DOC's PUTUSAN AKHIR UPLOAD

Upload e-Docs Pada DIREKTORI PUTUSAN

- Jumlah Perkara Putus: 3.292
- Jumlah Perkara Minutasi: 0.372
- Jumlah Perkara Belum Minutasi: 4.20
- Jumlah File Putusan yang diupload (lokal): 3.015
- Jumlah File Putusan yang Belum diupload (lokal): 277
- Jumlah Putusan yang tercatat pada Direktori Putusan (e-Docs): 522
- Jumlah Putusan yang belum diupload ke Direktori Putusan (e-Docs): 0
- Jumlah Putusan [AMBIGU] Pada Direktori Putusan (e-Docs): Tidak Ada Data
- Jumlah Antrian Saat ini: Masuk 7, Suksesi 747, Cagat 316

#### ANTRIAN E-DOC's UPAYA HUKUM UPLOAD

Upload e-Docs Pada DIREKTORI PUTUSAN

#	Task	Progress	Label
1.	e-Docs Putusan Akhir Tingkat Pertama	0.0%	Antrean
1.	e-Docs Data Dukung Upaya Hukum Banding	0.0%	Antrean
2.	e-Docs Data Dukung Upaya Hukum Kasasi	0.0%	Antrean
3.	e-Docs File Upaya Hukum Persetujuan Kembali	0.0%	Antrean

#### ANTRIAN SAAT INI!!!

Upload e-Docs Pada DIREKTORI PUTUSAN

- Putusan Terupload: 0 Status Antrean
- Upaya Hukum: 0 Antrean
- File Pendukung: 0 Antrean

Load Time : 0.060 Sec | Memory Available: 122.8M | Memory Usage : 4.50MB  
 Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015  
 User Online : Version 3.2.0-3

Gambar menu antrian direktori putusan pada aplikasi SIPP

---

## BAB V

### PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

#### 1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa/kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent / ICPE). Upaya penjaminan mutu Pengadilan Negeri Bantul dilakukan dengan memperkuat sistem manajemen mutu yang mengacu pada sistem yang dikembangkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang terdiri dari beberapa kriteria. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

- Kriteria 1 (Leadership) yaitu meliputi Komitmen Manajemen; Kebijakan Mutu; Wewenang dan Komunikasi; Tinjauan Manajemen
- Kriteria 2 (Strategic Planning), yaitu meliputi Perencanaan sistem manajemen mutu; Realisasi Produk Analisa dan perbaikan
- Kriteria 3 (Customer Focus) yaitu meliputi Proses berkait dengan pelanggan; Komunikasi pelanggan; Produk milik pelanggan
- Kriteria 4 (Document System), yaitu meliputi Persyaratan Dokumen; Pengelolaan Dokumen
- Kriteria 5 (Resource Management), yaitu meliputi Sumberdaya manusia; Sumberdaya Infrastruktur; Sumberdaya lingkungan
- Kriteria 6 (Proses Manajemen), yaitu Pengendalian proses
- Kriteria 7 (Performance Result), yaitu meliputi Pengawasan dan Pengendalian; Analisis data dan Perbaikan.

Dengan sistem penjaminan mutu tersebut kemudian ditetapkan standar penjaminan mutu pelayanan. Dalam ranah implementasi sistem penjaminan mutu ruang lingkupnya meliputi proses pelayanan peradilan yang meliputi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Bantul.

Penjaminan mutu Pengadilan Negeri Bantul telah dilaksanakan penilaian oleh Tim Audit Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada tanggal 11 November 2017. Dengan membandingkan antara konsep yang diusung oleh pimpinan Pengadilan Negeri Bantul dengan bukti-bukti implementasi/pelaksanaan kebijakan sampai di tingkat pelaksana, Tim

---

Tujuan penerapan PTSP sendiri tidak lain untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan PTSP di Pengadilan Negeri Bantul adalah dengan menempatkan 5 (lima) loket/meja layanan, yaitu Umum-keuangan (layanan surat masuk), Pelayanan Perdata, Pelayanan Pidana, Pelayanan Hukum, dan loket informasi dan pengaduan.

Selama tahun 2019 jumlah layanan yang tercatat mendapatkan/mendaftarkan layanan peradilan melalui PTSP Pengadilan Negeri Bantul adalah sejumlah 2.249 layanan/permohonan.

### **3. Inovasi Pelayanan Publik**

Sebuah era dimana pelayanan publik oleh instansi menjadi sesuatu yang kompetitif dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, maka inovasi-inovasi terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat menjadi sebuah produk unggulan yang membedakan antara satu instansi dengan instansi yang lain, bahkan bisa juga menjadi tuntutan bagi sebuah instansi untuk mempunyai sebuah inovasi pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat peluang untuk berinovasi menggantikan dan atau melengkapi sistem pelayanan konvensional menjadi besar.

Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu instansi di bidang peradilan menerapkan sebuah inovasi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun bagi pengadilan sendiri, yaitu:

#### **1. Sistem Antrian Persidangan**

Adalah sebuah aplikasi yang membantu urutan bersidang sehingga para pihak mendapatkan kejelasan atas urutan persidangan yang akan dijalani. Mekanisme dari sistem ini adalah para pihak yang datang akan melapor ke loket konfirmasi untuk mengkonfirmasi kehadirannya. Setelah semua pihak lengkap maka ia mendapatkan antrian untuk segera bersidang. Segera setelah majelis hakim siap maka pihak dengan perkara tersebut akan dipanggil untuk bersidang dengan menggunakan aplikasi tersebut.

---

Sebelum ada sistem antrian ini para pihak kurang mendapatkan kejelasan atas persidangan yang akan dijalani. Sehingga sering para pihak harus mengantri lama menunggu tanpa informasi yang jelas atas status persidangannya. dengan adanya loket ini para pihak bisa mendapatkan informasi yang jelas atas persidangan yang dijalani.

Kemudian sebelum ada antrian persidangan para pihak masih harus bertemu langsung dengan Panitera Pengganti untuk lapor sidang. Setelah ada sistem antrian, para pihak hanya melakukan lapor sidang di loket yang disediakan dan menunggu untuk dipanggil sidang.

## 2. Sistem antrian PTSP

Adalah aplikasi untuk mendapatkan antrian pelayanan di PTSP. Terdapat empat layanan, yaitu Hukum, Pidana, Perdata, dan Umum untuk penerimaan surat ke Pengadilan Negeri Bantul. sebuah PC dan printer hotprint untuk mencetak kartu antrian.

Sebagaimana lazimnya mesin antrian, pengunjung akan memilih layanan yang dikehendaki dengan klik icon yang disediakan pada layar PC untuk mendapatkan antrian untuk kemudian diserahkan kepada petugas PTSP ketika sudah mendapatkan panggilan secara elektronik dari aplikasi tersebut.

Perbedaan setelah menggunakan sistem antrian ini adalah bahwa pengunjung mendapatkan urutan sesuai kedatangan sehingga selain tidak berebutan untuk mendapatkan layanan, juga adil bagi pengunjung karena tidak ada pengunjung yang datang awal akan tetapi mendapatkan layanan di akhir atau urutannya terlompati.

Sebelum ada antrian PTSP, jumlah pengunjung PTSP tidak dapat terdokumentasi dengan baik. Setelah ada antrian PTSP, jumlah pengunjung dapat diketahui salah satunya menggunakan jumlah antrian yang ada.

Manfaat Yang Diperoleh dari adanya kedua sistem antrian tersebut adalah

- Sistem antrian persidangan:
  - a. Pembatasan akses para pihak untuk bertemu dengan Panitera/panitera pengganti secara langsung sebelum persidangan sangat berkurang
  - b. Para pihak dan/atau pengunjung persidangan lebih mendapatkan kepastian atas urutan persidangan.
  - c. Para pihak/pengunjung dapat mengetahui status kelengkapan pihak-pihak yang bersidang sehingga bisa segera bersidang.
- Manfaat sistem antrian PTSP:

- 
- a. Bagi institusi pengadilan, antrian ini memberikan manfaat pada keteraturan dan ketertiban dalam pelayanan kepada masyarakat, juga akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan dengan.
  - b. Sedangkan bagi masyarakat, adanya sistem antrian ini akan memberikan jaminan bahwa masyarakat akan terlayani sesuai dengan loket dan nomor antrian yang telah didapatkan.

---

## BAB VI PENGAWASAN

### A. Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional :

1. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan. Guna mendukung pengawasan melekat, maka Ketua Pengadilan Negeri Bantul telah melakukan 3 (tiga) metode pengawasan internal yaitu :
  - a. Terbitnya SK Ketua Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang. Pengawasan tiap bidang dilakukan setiap bulannya oleh Hakim Pengawas Bidang. Hakim pengawas bidang telah melaksanakan tugasnya dengan membuat laporan pengawasan yang disampaikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul selaku koordinator Pengawas Bidang dan kemudian menyampaikan hasil tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
  - b. Pertemuan secara berkala setiap bulan sekali diperuntukkan bagi seluruh pegawai dan hakim Pengadilan Negeri Bantul diperlukan untuk mendapatkan informasi kendala-kendala apa saja yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan di Pengadilan Negeri Bantul.
  - c. Rapat berjenjang mulai dari kasubbag dan panmud dengan staf-nya; panitera dan sekretaris dengan para panmud dan kasubag. Rapat empat pilar yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan sekretaris.
  - d. Pertemuan secara insidentil untuk pimpinan pengadilan dan hakim atau pimpinan pengadilan dan jajaran kepaniteraan dan sekretariat sebagai sarana pengawasan manajerial di Pengadilan Negeri Bantul.
2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang diperuntukkan untuk itu. Selama tahun 2019, di Pengadilan Negeri Bantul telah

---

dilaksanakan pengawasan Internal dalam Bentuk Pengawasan Fungsional sekaligus melekat. Berikut Pengawasan yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Bantul di tahun 2019 :

- Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 24-25 Juni 2019;
- Pembinaan dan pendampingan baik secara resmi maupun yang bersifat mendadak oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkaitan dengan tupoksi maupun program Zona Integritas yang sedang disusun oleh Pengadilan Negeri Bantul;

## **B. Evaluasi**

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Bantul baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.



---

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. KESIMPULAN

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 yang kami susun ini kami simpulkan mengenai beberapa hal diantaranya ialah :

- Keadaan perkara lima tahun terakhir untuk perdata cenderung naik jumlahnya dengan 745 perkara di tahun 2019; utk pidana paling tinggi di tahun 2016 dengan 656 perkara dan lalu lintas juga mengalami kenaikan dari 12.843 di tahun 2014 dan 30.381 di tahun 2019.
- Untuk perkara banding tiga tahun terakhir pidana cenderung stabil, sedangkan untuk perkara perdata cenderung naik dari 17 perkara di tahun 2016 hingga 54 perkara di 2019.
- Persentase penyelesaian sisa perkara adalah 78,15%. Sisa perkara adalah perkara eksekusi. Sedangkan sisa perkara yang lain dapat terselesaikan 100%.
- Tidak ada perkara yang terlambat, artinya semua perkara dapat terselesaikan secara tepat waktu yaitu dapat diselesaikan dalam waktu dibawah lima bulan.
- Perkara yang tidak diajukan upaya hukum adalah 85,95% untuk banding; 97,33% untuk kasasi; dan 99,59% untuk Peninjauan Kembali.
- Penyelesaian perkara secara mediasi adalah 2,66% dari perkara yang di mediasi. Sedangkan untuk diversifikasi, dari 4 yang memenuhi syarat diversifikasi tidak ada yang berhasil.
- Survelinan Akreditasi Penjaminan Mutu sudah dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2019 oleh tim APM dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Posbakum bekerjasama dengan 9 LBH dengan 312 jam layanan dan terdapat 39 konsultasi yang terlayani.
- Jumlah SDM adalah 52 orang. Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 56 orang. Dengan jumlah tersebut beban kerja dirasa tinggi.
- Realisasi anggaran DIPA 01 adalah 98,07%; dan realisasi DIPA 03 adalah 99,00%.

- 
- Penambahan sarana prasarana adalah laptop untuk hakim sejumlah 7 unit, dan tambahan berupa sarana pendukung e-court dengan mekanisme transfer masuk dari mahkamah agung.
  - Untuk sarana gedung berupa pemeliharaan-pembenahan seperti ruang tunggu pengunjung sidang, pembatas akses pengunjung pengadilan, saluran air, soking area, ruang-ruang publik (laktasi/kesehatan, mediasi/kaukus), pagar, jaringan-jaringan.
  - Untuk perkara e-court sudah berjalan dengan adanya sejumlah 52 (26,66%) perkara yang didaftarkan melalui e-court.
  - Untuk SIPP sudah menggunakan versi 3.3.0-1
  - Inovasi yang dikembangkan adalah berupa aplikasi antrian untuk persidangan dan antrian untuk pengunjung PTSP. Manfaat yang diperoleh dengan adanya antrian ini adalah bagi pengadilan menjadi lebih tertib dan tertata dalam memberikan pelayanan baik persidangan maupun layanan di PTSP. Sedangkan bagi pengunjung adalah bahwa pengunjung mendapatkan kejelasan dan jaminan akan terlayannya kepentingan mereka di pengadilan.

## **B. REKOMENDASI**

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 yang kami susun dan dari kesimpulan yang ada, maka beberapa rekomendasi demi tercapainya visi dan misi Pengadilan Negeri Bantul :


- Mengingat perkara yang semakin bertambah dengan tidak diimbangi oleh penambahan sumber daya, diperlukan kebijakan dari pimpinan untuk penyelesaian perkara secara cepat dan benar. Ataupun jika dimungkinkan adanya penambahan pegawai.
- Terkait sarana ruang-ruangan publik sebagai salah satu prasyarat kelayakan sebuah instansi publik, Pengadilan Negeri Bantul masih kekurangan ruangan sehingga hanya mengoptimalkan ruangan yang ada. Satu ruangan difungsikan untuk beberapa ruang, misalkan satu ruangan untuk ruang mediasi/kaukus/pengacara. Jika dimungkinkan adanya penambahan dana untuk rehab gedung.
- Terkait pengelolaan pegawai supaya dapat ditambah staf administrasi baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan;

- 
- Untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan program dari Mahkamah Agung diperlukan sarana pojok e-court, ruangan media center/ co-working area,

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2019. Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua pihak dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bantul. Tentunya, dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detail namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bantul, dengan harapan tahun mendatang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang.



Bantul, 08 Januari 2020  
Pengadilan Negeri Bantul  
Ketua,

  
ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.  
NIP. 196711291992121001

# Lampiran



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB  
KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR:W13.U5/ 75 /SK.KPN/OT.01.2/XII/2019

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN  
TAHUN 2019

- Menimbang :
- a. Bahwa Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik berupa Laporan Tahunan 2019;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang pembentukan Tim Pengelola dan Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2019.
  - c. Bahwa nama-nama yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan Pengelolaan dan Menyusun Laporan Tahunan Tahun 2019
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  4. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
  5. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
  6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan)
  7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2019
- KESATU : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Tahunan 2019 Pengadilan Negeri Bantul
- KEDUA : Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Tahunan kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 20 Desember 2019

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**



ALIMIN RIBUT SUJONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta ( Sebagai laporan )
2. Desk Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul
3. Pegawai yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR: W13.U5/ 75 /SK.KPN/OT.01.2/XII/2019  
TENTANG TIM PENGELOLA DAN PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2019

TIM PENGELOLA DAN PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2019

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan	Nama
1.	Penasehat	Ketua	Alimin Ribut Sujono, S.H.,M.H NIP. 196711291992121001
		Wakil Ketua	Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H.,M.H NIP. 197508161999031003
2.	Penanggung Jawab	Panitera	Rudi Safari, S.H.,M.H NIP. 196606091996031002
		Sekretaris	Yuyun Fithriyah, S.E.A.k NIP. 197908222005022001
3.	Anggota	Panitera Muda Hukum	Eka Surya Setiawan, S.H NIP. 197606132000121001
		Panitera Muda Pidana	Suharna, S.H.,M.H NIP. 196110191986031003
		Panitera Muda Perdata	Vironika Sri Yuliati, S.Sos.,S.H.,M.H NIP. 197207092006042002
		Kasubbag Umum dan Keuangan	Johan Wahyudi, S.E NIP. 197704222009121001
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Wirawan Dwi Asmara, S.I.P NIP. 198205012009041007
4.	Sekretariat	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Niken Kusumaratri Sudarmaji, S.H NIP. 198305262002122001
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Wirawan Dwi Asmara, S.I.P NIP. 198205012009041007

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



ALIMIN RIBUT SUJONO